

Katalog : 1101002.21

STATISTIK DAERAH

*Provinsi
Kepulauan Riau*

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

STATISTIK DAERAH

*Provinsi
Kepulauan Riau*

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

STATISTIK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2017

Katalog : 1101002.21
No. Publikasi : 21550.1706
ISSN : 2442-6296
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 76 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Cover:
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak Oleh:
CV Berkah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

<https://kpr.ri.bps.go.id>

KEPALA BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Daerah (Statda) Provinsi Kepulauan Riau 2017 merupakan series publikasi dari tahun sebelumnya. Publikasi ini memuat berbagai data dan informasi terpilih seputar Kepulauan Riau yang dilengkapi analisis sederhana dengan tahun data hingga 2016.

Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada informasi/indikator yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berperan dalam penerbitan publikasi ini.

Tanjungpinang, September 2017
Kepala BPS
Provinsi Kepulauan Riau



Panusunan Siregar, M.Sc

DAFTAR ISI

1. Geografi dan Iklim	1
2. Pemerintahan	5
3. Penduduk	9
4. Ketenagakerjaan	13
5. Pendidikan	17
6. Kesehatan	21
7. Perumahan	25
8. Pembangunan Manusia	29
9. Pertanian	33
10. Listrik dan Air	37
11. Perdagangan	41
12. Konstruksi	45
13. Hotel dan Pariwisata	49
14. Transportasi dan Komunikasi	53
15. Perbankan dan Investasi	57
16. Harga-Harga	61
17. Pengeluaran Penduduk	65
18. Pendapatan Regional	69
19. Perbandingan Regional	73

Geografi & Iklim

1



27,9°

Rata-rata
Suhu
Tahun 2016
27,9°C



Persentase Penyinaran
Matahari Tahun 2016
47,20 %

Rata-rata Curah
Hujan Tahun 2016
216,3mm



Sepanjang Tahun
2016 Terjadi hujan
Sebanyak 212 hari



Rata-rata
Kecepatan Angin
Tahun 2016
5,1 knot

GEOGRAFI DAN IKLIM

Provinsi Kecil di Indonesia

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kecil dengan luas wilayah hanya 0,43 persen dari luas wilayah Indonesia.

1

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km², terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°4'BT.

Provinsi Kepulauan Riau hampir 95 persennya adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, sehingga jarak terjauh sekitar 440 km antara Tanjungpinang dan Natuna.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang beriklim tropis mempunyai keunikan tersendiri dibanding daerah lainnya di Indonesia karena hujan turun hampir sepanjang tahun. Selama tahun 2016 Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak diguyur hujan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi hujan sebanyak 212 hari sedangkan pada tahun 2015 terjadi hujan sebanyak 155 hari. Rata-rata curah hujan pada tahun 2016 sebesar 216,3 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi di Kota Tanjungpinang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kedadaan Provinsi Kepulauan Riau secara umum beriklim laut dengan suhu udara rata-rata sepanjang tahun 2016 berkisar 27,9°C, dengan kelembaban udara rata-rata 84,1%, dan kecepatan angin 5,1 knot.

Peta Provinsi Kepulauan Riau



Statistik Geografi dan Iklim
Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Uraian	2016
Luas	
- Daratan (km ²)	8 201,72
Pulau	1.796
Kecamatan	70
Desa/Kelurahan	416
Suhu (°C)	27,9
Curah hujan (mm)	216,3
Hujan (hari)	212
Kecepatan Angin (knot)	5,1
Kelembaban Udara (%)	84,1

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

*** Tahukah Anda

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi dengan luas terkecil di Sumatera.

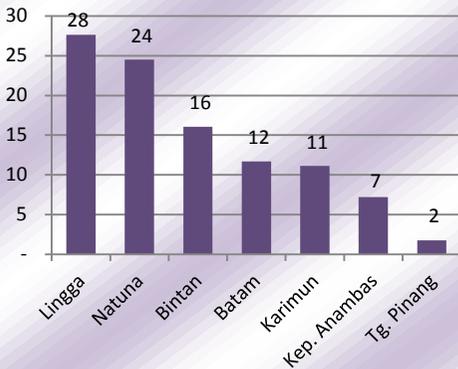
1

GEOGRAFI DAN IKLIM

Kabupaten Natuna Terjauh

Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten terjauh dengan jarak 440 kmdengan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjungpinang.

Persentase Luas Daratan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (%)



Sumber :Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

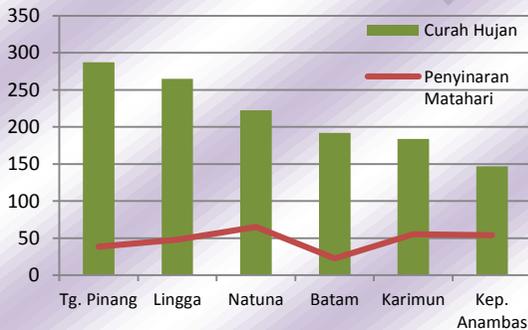
Kabupaten Lingga mempunyai persentase luas daratan terbesar di Propinsi Kepulauan Riau, yaitu kurang lebih sebesar 28 persen, kemudian Kabupaten Natuna 24 persen, Kabupaten Bintan 16 persen, Kota Batam 12 persen, Kabupaten Karimun 11 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 7 persen dan Kota Tanjungpinang 2 persen saja.

Berdasarkan relief dan topografinya, di antara Kabupaten/kota yang terletak di Kepulauan Riau terbentang lautan. Pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan yang terdapat di ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau tergolong daerah yang kurang subur karena tanahnya mengandung bauksit. Hal ini pula yang membuat sektor pertanian masih kurang dilirik sebagai mata pencaharian utama.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan luas lautan yang besar, dimana luas daratannya kurang lebih sekitar 4 persen saja, hal ini yang membuat sektor perikanan menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa kekayaan alam Provinsi Kepulauan Riau seperti laut dan dijadikan obyek wisata yang dapat menarik banyak wisatawan, baik dalam maupun luar negeri.

Banyaknya Curah Hujan (mm) dan Persentase Penyinaran Matahari Provinsi Kepulauan Riau (%), 2016



Sumber :Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

*** Tahukah Anda

Hujan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 terjadi di Kota Tanjungpinang selama 243 hari.

Jumlah PNS di Pemerintahan Provinsi Kepri Tahun 2016



Peran Perempuan dalam Partai Politik Provinsi Kepri Tahun 2016



PEMERINTAHAN

2

Tujuh Puluh Dua Persen PNS di Kepulauan Riau Berpendidikan Tinggi Kesadaran PNS untuk meningkatkan diri adalah salah satu alasan meningkatnya jumlah PNS yang berpendidikan tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi yang mengalami pemekaran wilayah (kabupaten/kota) sejak era otonomi daerah. Provinsi Kepulauan Riau berdiri berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2002 yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Pada tahun 2008 Provinsi Kepulauan Riau mengalami pemekaran wilayah, berdasarkan UU No.33/2008, Kabupaten Natuna dibagi menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Kepulauan Riau cenderung terus meningkat. Untuk kondisi tahun 2016, terjadi penambahan sebanyak 21 orang pegawai. Pertumbuhan peningkatan penambahan pegawai di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 0,8 persen. Pada tahun 2016 ini penambahan pegawai masih didominasi oleh pegawai perempuan. Secara total PNS di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase mencapai 54 persen.

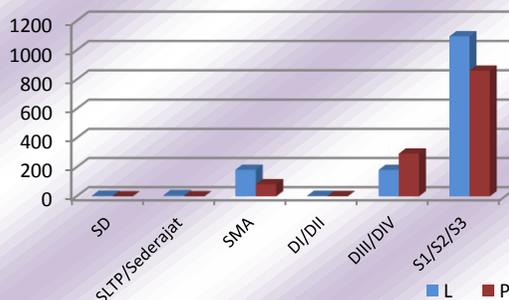
Tidak saja kuantitas/jumlah pegawai yang mengalami peningkatan, dari segi kualitas juga cenderung memperlihatkan adanya perbaikan. Pegawai yang memiliki pendidikan tinggi meningkat di satu sisi, sementara disisi lain jumlah pegawai dengan pendidikan SMU ke bawah mengalami penurunan sehingga besar harapan akan terjadi peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Statistik Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Kabupaten	5	5	5
Kota	2	2	2
Kecamatan	66	70	70
Desa/Kelurahan	416	416	416
Jumlah PNS	2 385	2 693	2 714
- Laki-Laki	1 330	1 460	1 474
- Perempuan	1 055	1 233	1 240

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Banyaknya PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin, 2016 (orang)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

*** Tahukah Anda

Data terakhir menunjukkan, berkurangnya jumlah PNS dengan pendidikan SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

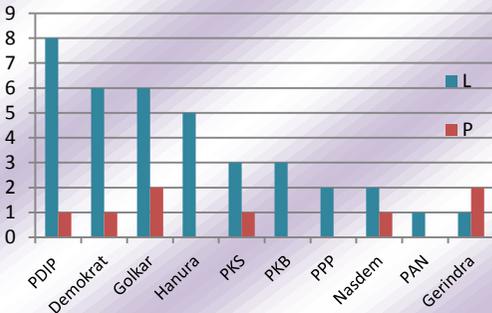
2

PEMERINTAHAN

Peranan Perempuan dalam Pemerintahan Masih Rendah

Peran perempuan dalam partai politik di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah. Hanya ada delapan orang perempuan saja yang duduk sebagai wakil rakyat.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (orang)



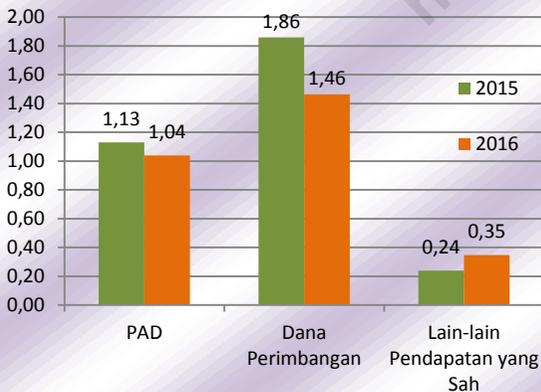
Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

Jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 adalah 45 orang. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai *rising star* telah berhasil menempatkan 9 orang wakilnya di DPRD Kepulauan Riau. Fraksi Golkar dapat 8 kursi, fraksi Demokrat dapat 7 kursi dan fraksi Hanura dapat 5 kursi, fraksi PKS dapat 4 kursi, dan fraksi PKB dan Gerindra sama-sama dapat 3 kursi.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah anggota DPRD Kepulauan Riau laki-laki lebih dominan. Dari 45 kursi yang tersedia, ada sekitar 37 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

APBD merupakan salah satu stimulus bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pada tahun 2016, realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau menghabiskan anggaran sekitar 3,23 triliun untuk membiayai pembangunan. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang baru mencapai 2,92 triliun.

Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (Triliun)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

APBD Kepulauan Riau sebagian besar bersumber pada dana perimbangan, yang pada tahun 2015 ini nilainya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dana perimbangan pada tahun 2016 sebesar 1,46 triliun atau turun sekitar 396 milyar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya pada tahun 2015 sebesar 1,86 triliun.

Sama halnya dengan penurunan dana perimbangan, PAD Kepulauan Riau mengalami penurunan di tahun 2016 sekitar 88 milyar dari tahun 2015. Dan untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 109 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

*** Tahukah Anda

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan Gubernur Kepulauan Riau secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada tahun 2005.



→ Terdapat 105 orang Laki-laki per 100 Perempuan

Sex Ratio
Provinsi Kepri 2016

Kepadatan Peduduk
Provinsi Kepri
(jiwa/km)



<https://kepri.bps.go.id>

PENDUDUK

3

Penduduk Usia Lanjut Cenderung Meningkat

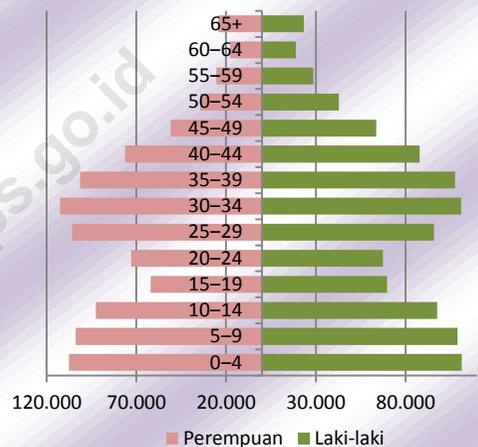
Di Provinsi Kepulauan Riau, sejak tahun 2013-2015 terjadi kenaikan 0,1 persen setiap tahunnya untuk penduduk usia lanjut.

Jumlah penduduk Kepulauan Riau berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2016 mencapai 2.028.169 jiwa, yang terdiri dari 1.035.466 laki-laki dan 987.658 perempuan, dimana rata-rata kepadatan penduduk di Kepulauan Riau berkisar 247 jiwa per kilometer persegi. Angka yang tergolong relatif tidak terlalu padat. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya berada di Kota Batam.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kepulauan Riau pada tahun 2016 lebih banyak penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari data *sex ratio* yang mendekati 104,84 persen, yang berarti ada 105 orang laki-laki di antara 100 perempuan.

Dari grafik piramida penduduk Provinsi Kepulauan Riau 2016 persentase penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur (30-34 tahun), baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Persentase penduduk terbesar kedua terletak pada kelompok umur balita (0-4 tahun) baik untuk laki-laki maupun perempuan. Angka pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 2,79 persen.

Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (orang)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

Indikator Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	1 917 415	1 973 043	2 023 169
Pertumbuhan Penduduk (%)	3,01	2,90	2,79
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	181	186	247
Sex Ratio (L/P) (%)	104,58	104,45	104,84
% Penduduk menurut Kelompok Umur (thn)			
0-14	30,88	30,87	30,76
15-64	66,93	66,86	66,88
>65	2,2	2,3	2,4

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

*** Tahukah Anda

61 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam.

3

PENDUDUK

Batam Tertinggi, Tanjungpinang Terpadat

Pada tahun 2016, Kota Batam menjadi daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi 4,13 persen, namun tingkat kepadatan tertinggi tetap di Kota Tanjungpinang dengan 1.416 jiwa per km².

Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Uraian	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan Penduduk per km ² (org/km ²)	Distribusi Persentase (%)
Karimun	227 277	249	11
Bintan	154 584	117	8
Natuna	75 282	37	4
Lingga	88 971	39	4
Kep. Anambas	40 921	69	2
Batam	1 236 399	1 288	61
Tanjungpinang	204 735	1 416	10
Prov. Kepri	2 028 169	247	100

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

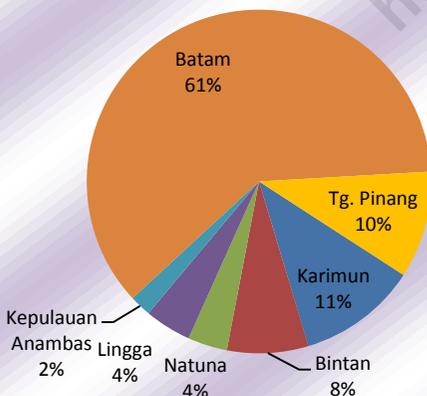
Kota Batam merupakan kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak, lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.2878 orang per kilometer persegi. Fenomena ini terkait potensi Kota Batam sebagai salah satu kota industri dan perdagangan internasional di Indonesia sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang menjadi tujuan utama kaum *migran* atau pendatang.

Disisi lain, Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 204.735 orang, memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 1.416 orang per km², hal ini dikarenakan luas Kota Tanjungpinang yang hanya sekitar 239,50 km².

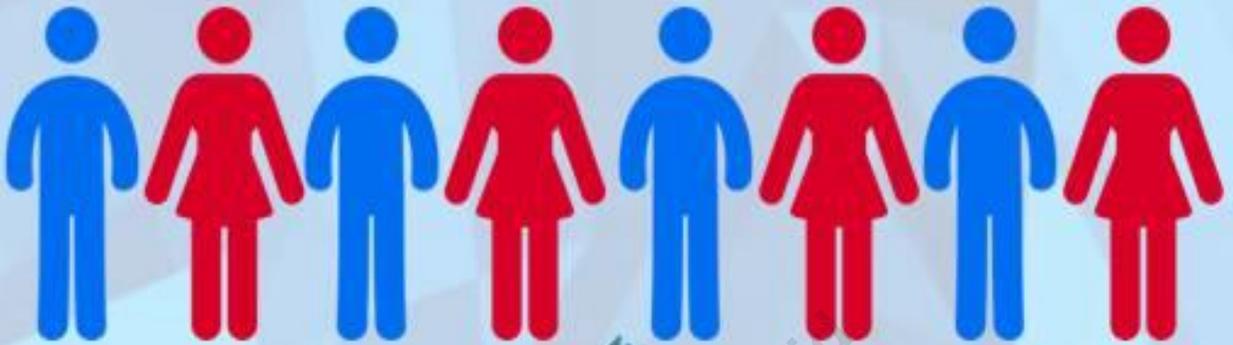
Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 memiliki *sex ratio* sebesar 106 yang berarti ada 106 orang laki-laki dari 100 orang perempuan.

Kabupaten Natuna dengan kepadatan penduduk terendah yang hanya sebanyak 37 orang per km², dengan jumlah penduduk sebanyak 75.282 orang dan dengan luas daratan sebesar 2.814,26 km².

Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (%)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017



Penduduk Usia Kerja
Provinsi Kepri Tahun 2016
1.381.411 orang

Persentase Pengangguran Kepri



KETENAGAKERJAAN

Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Menyerap Pekerja Paling Banyak

Dari seluruh penduduk usia kerja, sekitar 27 persen bekerja di sektor ini.

4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 TPAK sebesar 65,07 persen naik menjadi 65,93 persen pada tahun 2016. Ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang mengalami sedikit peningkatan di mana pada tahun 2015 tingkat pengangguran sebesar 6,20 persen naik menjadi 7,69 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93,79 persen turun menjadi 92,31 persen pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan kaidah normatif yang jumlah pengangguran meningkat, maka jumlah yang bekerja menjadi turun.

Dilihat dari standar upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 UMP mencapai Rp. 1.955.000, lalu meningkat menjadi Rp. 2.178.710 (meningkat 11,44 persen) di tahun 2016.

Kendati tidak ada jaminan bahwa semua perusahaan telah menerapkan gaji sama dengan UMP, namun setidaknya hal ini secara kasar dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pekerjakarena peningkatan penghasilan masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau belum merata jika dilihat dari sektor utamanya. Penduduk yang bekerja diklasifikasikan berdasarkan tiga sektor utama, yaitu: primer (P), sekunder (S) dan tersier (T). Dari ketiga sektor utama itu, jumlah pekerja terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016, bekerja pada sektor tersier, kemudian sektor sekunder dan terakhir sektor primer. Penduduk yang bekerja pada sektor tersier sebesar 63 persen, sektor sekunder sebesar 23 persen dan sektor primer hanya 14 persen.

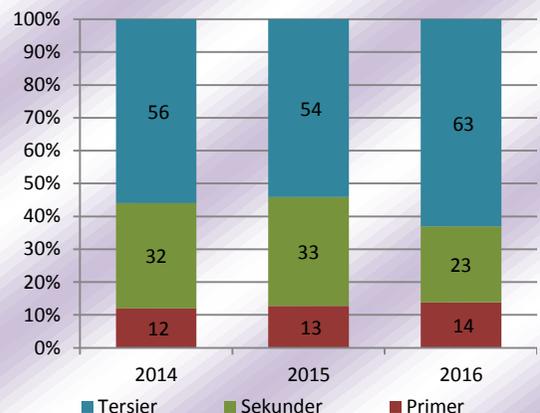
Berdasarkan data statistik tenaga kerja Provinsi Kepulauan Riau, persentase jumlah pekerja yang bekerja pada sektor formal lebih besar dibandingkan pekerja yang bekerja pada sektor

Statistik Ketenagakerjaan
Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
TPAK (%)	65,95	65,07	65,93
Tingkat Pengangguran (%)	6,69	6,20	7,69
Bekerja (%)	93,31	93,79	92,31
UMP (Rp)	1 665 500	1 955 000	2 178 710
Bekerja di Sektor Primer (orang)	96 345	106 235	118 208
Bekerja di Sektor Sekunder (orang)	264 994	278 854	201 646
Bekerja di Sektor Tersier (orang)	458 317	451 581	539 959

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

Persentase Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Bekerja menurut Sektor Utama, 2014-2016 (%)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

4

KETENAGAKERJAAN

Persentase Pekerja Formal Meningkat

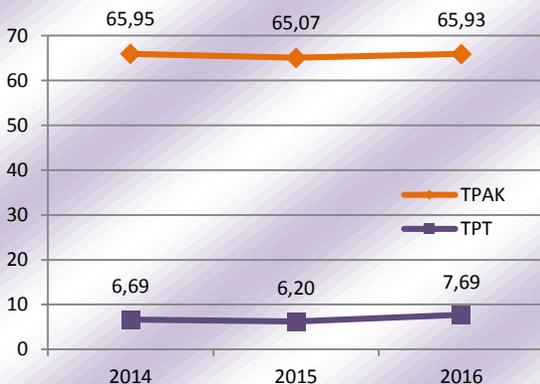
Terjadi peningkatan jumlah pekerja formal pada tahun 2015 sebesar 2,78 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Statistik Ketenagakerjaan
Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Status Pekerjaan (%)			
- Pekerja Formal	71,30	69,12	66,20
- Pekerja Informal	29,70	30,88	33,80
Pendidikan (%)			
- SLTP ke bawah	41,50	39,23	41,46
- SLTA	46,40	45,56	42,29
- D-I/DII/DIII	3,06	3,68	4,77
- S1/S2/S3	9,75	11,53	11,47
Jam Kerja (%)			
- Di bawah 35 jam seminggu	15,97	15,84	17,17
- 35 jam/lebih seminggu	84,03	84,16	82,83

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Persentase TPAK dan TPT
di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (%)



Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

informal. Pada tahun 2016 sebesar 66,20 persen pekerja yang bekerja pada sektor formal dan 33,80 persen pekerja yang bekerja pada sektor informal.

Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan pekerja, maka persentase pekerja dengan tingkat pendidikan SLTA pada tahun 2016 paling besar, yaitu sebesar 42,29 persen, lalu diikuti dengan pekerja dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah sebesar 41,46 persen dan pekerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 sebesar 11,47 persen. Sebagian besar yang terserap pada lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki pendidikan yang rendah.

Rendahnya pendidikan pekerja, serta status pekerjaan pada sektor informal akan berimplikasi pula pada tingkat pendapatan yang diterima yang bisa dipastikan relatif rendah. Ditambah lagi jika dilihat dari jam kerjanya, para pekerja di Provinsi Kepulauan Riau masih banyak yang bekerja dibawah jam kerja normal. Ini artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan lapangan kerja. Kondisi diatas kemungkinan terkait juga dengan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang bersandar pada sektor tersier. Perkembangan pariwisata dalam arti luas telah menciptakan banyak kesempatan pada sektor informal yang sebagian besar tidak memerlukan persyaratan keahlian tertentu. Disisi lain, lapangan pekerjaan yang mengharuskan keterampilan atau pendidikan khusus jumlahnya terbatas dan masih banyak yang belum mampu dimasuki oleh para pekerja Kepulauan Riau (terjadi *miss match* ketenagakerjaan), seperti juga yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Namun masih sedikit beruntung bahwa kondisi tersebut berangsur-angsur membaik, yang ditunjukkan oleh peningkatan kesempatan kerja, pendapatan pekerja, serta pekerja dengan pendidikan tinggi.

Rasio Murid –Guru
Provinsi Kepri
Tahun 2016



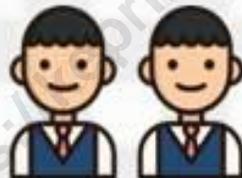
SD



245



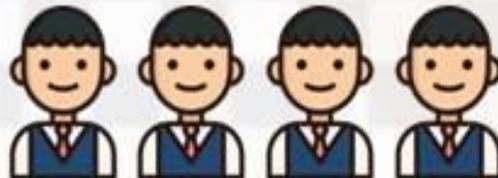
SMP



193



SMA



396



Rata-rata Lama
Sekolah Provinsi
Kepri Tahun
2016 :
9,67 Tahun





PENDIDIKAN

Partisipasi Sekolah Terus Meningkat

Angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-15 tahun di Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan.

5

Perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau cukup membanggakan, terutama jika dilihat dari kemampuan baca tulis (angka melek huruf) dan angka partisipasi sekolah. Seperti terlihat pada tabel, secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan *trend* yang terus meningkat atau ada perbaikan secara kontinyu dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan diantara keduanya, tampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk laki-laki masih lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Meningkatnya kualitas penduduk Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh semakin bertambahnya akses penduduk terhadap pendidikan, yang dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS penduduk Provinsi Kepulauan Riau untuk kelompok umur 7-12, umur 13-15 dan umur 16-18 pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Angka partisipasi sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 yang rata-rata mencapai 99,33 persen (umur 7-12 tahun), 98,78 persen (umur 13-15 tahun) dan 82,04 persen (umur 16-18 tahun).

Angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 pada saat SD kelas 6 sebanyak 9,21 persen, putus saat SMP kelas 3 sebanyak 24,57 persen, dan putus saat SMA kelas 3 sebanyak 69,20 persen.

Namun demikian, ini masih memprihatinkan mengingat pentingnya pendidikan formal untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai yang pada akhirnya akan bermuara pada pendapatan yang lebih baik.

Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2016



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia (persen), 2014-2016

Usia	Indikator	2014	2015	2016
7-12	Kepulauan Riau	99,12	99,34	99,33
	Indonesia	98,92	99,09	99,09
13-15	Kepulauan Riau	98,56	98,67	98,78
	Indonesia	94,44	94,72	94,88
16-18	Kepulauan Riau	81,57	81,84	82,04
	Indonesia	70,31	70,61	70,83

Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

5

PENDIDIKAN

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepri Meningkat

Pada tahun 2016, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kepulauan Riau.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (Tahun)

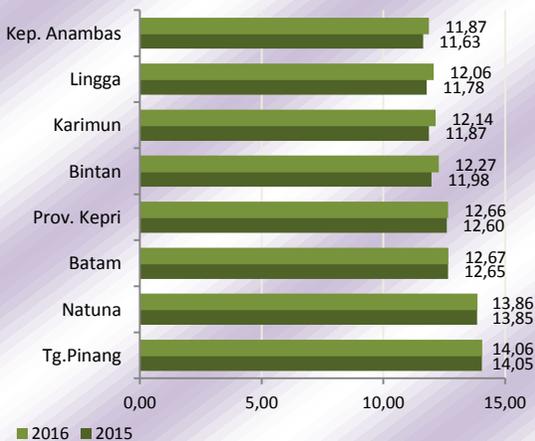


Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu daerah. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Dimensi pendidikan lainnya dapat digambarkan dengan indikator rata-rata lama sekolah atau *Mean Years of Scholling (MYS)*.

Pada tahun 2016, MYS penduduk Kepulauan Riau sebesar 9,67 tahun yang dapat diartikan bahwa penduduk Kepulauan Riau yang berusia 15 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam pendidikan formal selama 9,67 tahun atau telah melaksanakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Kota Batam memiliki MYS tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 11,10 tahun atau setara dengan duduk di bangku kelas XI atau kelas II SMA.

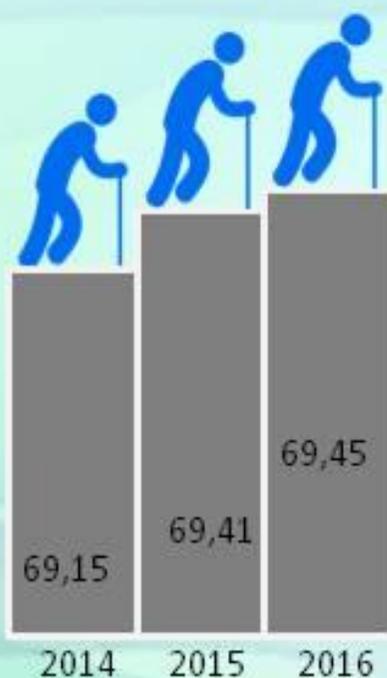
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (Tahun)



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 adalah 12,66, artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. HLS tertinggi di Kota tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. HLS terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas 11,87, artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang menamatkan pendidikan mereka hingga kelas 3 SMA. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepri Tahun 2016



Angka Harapan Hidup
Provinsi Kepri Terus
Meningkat

KESEHATAN

6

Puskesmas Menjadi Pilihan Utama

Selama tahun 2016, puskesmas menjadi tempat tujuan utama masyarakat untuk berobat, terutama untuk masyarakat Kab. Kep. Anambas, Kota Tanjungpinang, Kab. Lingga dan Kab. Bintan.

Salah satu cara untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis yang dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayinya. Pada tahun 2016, terdapat 99,2 persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 97,7 persen.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau lebih memilih bidan sebagai penolong kelahiran. Terjadi peningkatan persentase penolong kelahiran oleh bidan di tahun 2016, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 54,9 persen kelahiran ditangani oleh bidan naik menjadi 61,3 persen pada tahun 2016.

Persentase penolong kelahiran oleh dukun bersalin jumlahnya turun menjadi 0,8 persen. Persalinan dibantu oleh dukun bersalin ini terbanyak terdapat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga, dimana terdapat 9,98 persen dan 3,85 persen persalinan dibantu oleh dukun bersalin. Hal ini dikarenakan masih bersifat pedesaan masyarakat di kedua kabupaten tersebut dan letak geografis pulau-pulau yang terpencil dan sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan medis.

Pengetahuan tentang pentingnya kesehatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau semakin meningkat sehingga dapat menggunakan jasa dokter sebagai penolong kelahirannya yang tentunya biayanya lebih mahal dari jasa bidan atau dukun bersalin.

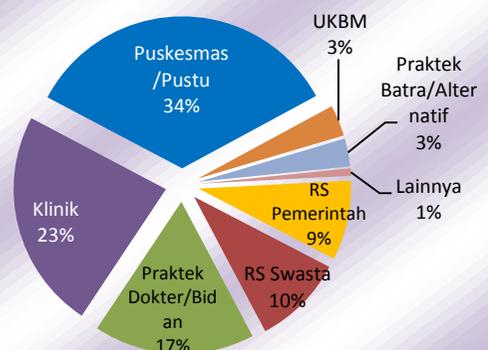
Sementara itu angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dari 69,15 tahun pada tahun 2014, meningkat menjadi 69,41 tahun pada tahun 2015 dan menjadi 69,45 tahun pada tahun 2016.

Statistik Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Penolong Kelahiran (%)			
- Dokter	44,3	40,0	37,4
- Bidan	52,7	54,9	61,3
- Tenaga Medis Lain	0,3	2,8	0,5
- Dukun Bersalin	2,4	2,4	0,8
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,15	69,41	69,45

Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (Persen)



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

6

KESEHATAN

Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Masih Belum Memadai

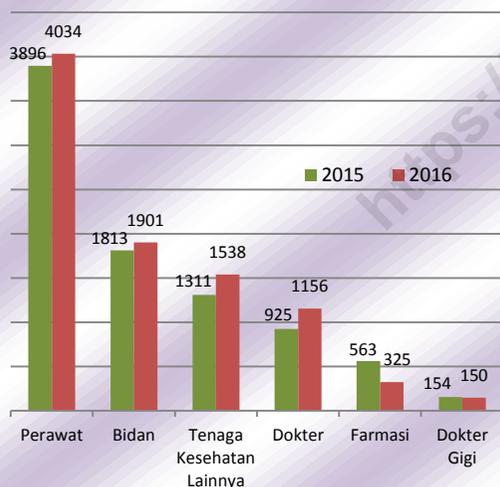
Jumlah dokter di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang terlihat pada tahun 2016 jumlah dokter naik 21 persen.

Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (Unit)

Uraian	2016
Rumah Sakit	27
Rumah Bersalin	86
Puskesmas	77
Posyandu	1 354
Klinik/Balai Kesehatan	237
Polindes	171

Sumber :Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Banyaknya Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (Orang)



Sumber :Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Dilihat dari sarana kesehatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 terdapat 27 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten/kota yang ada dimana rumah sakit terbanyak terdapat di Kota Batam. Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah untuk menambah pembangunan rumah sakit dimana di Kabupaten Natuna hanya terdapat 1 rumah sakit saja dan Kota Tanjungpinang hanya terdapat 3 rumah sakit saja tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada.

Keberadaan fasilitas layanan kesehatan tentu harus diikuti dengan ketersediaan tenaga medisnya. Secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga medis di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, kecuali jumlah tenaga farmasi yang berkurang dari 563 orang pada tahun 2015 menjadi 325 orang pada tahun 2016. Sama halnya dengan jumlah dokter gigi yang mengalami sedikit penurunan dari 154 orang pada tahun 2015 menjadi 150 orang pada tahun 2016. Hal ini tentu saja berarti masih dibutuhkannya lebih banyak tenaga medis di Provinsi ini terutama di pulau-pulau.

Capaian terpenting dari kesehatan masyarakat adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kepulauan Riau secara umum. AHH yang bisa dijadikan cerminan dari akumulasi kesehatan masyarakat telah meningkat menjadi 69,45 tahun. Peningkatan ini adalah hasil dari perbaikan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, dan peran pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang mengalami perkembangan positif dalam tahun-tahun terakhir ini.

Statistik Perumahan di Provinsi Kepri Tahun 2016

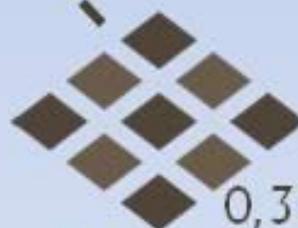


98,69 % Ruta Telah
Mempunyai Atap Layak

89,08 % Ruta Menggunakan
Air Minum Bersih



78,67 % Ruta Menggunakan
Dinding Permanen



0,33 % Ruta Masih
Menggunakan Lantai Tanah

PERUMAHAN

Masih Ada Rumah yang Belum Bisa Dikategorikan Sehat

Persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau dengan luas lantai kurang dari 20 m² tahun 2016 naik dibandingkan dengan tahun 2015.

7

Sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu bagi seluruh anggota keluarga, kondisi rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kesehatan para penghuninya. Lebih jauh dalam fungsinya sebagai tempat tinggal dan beraktivitas sehari-hari, sebuah rumah yang baik tentu harus mempertimbangkan kondisi drainase, pencahayaan, air bersih dan sirkulasi udara yang memadai.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) rumah tinggal yang dapat dikategorikan sehat adalah yang memiliki luas lantai per kapita minimal 20 m². Berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan oleh BPS, didapatkan fakta bahwa persentase rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 persen tahun 2016 meningkat menjadi 6,73 persen dibandingkan tahun lalu 5,22 persen. Hal tersebut dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat yang sedikit menurun sehingga kurang mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah dengan luas lantai lebih dari 20 meter persegi.

Ada sebanyak 0,33 persen rumah tangga yang menggunakan lantai tanah pada tahun 2016, dan persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,14 persen. Selain itu, pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan atap layak dan dinding permanen masing-masing sebesar 98,69 persen dan 78,67 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan di Kepulauan Riau sudah memadai.

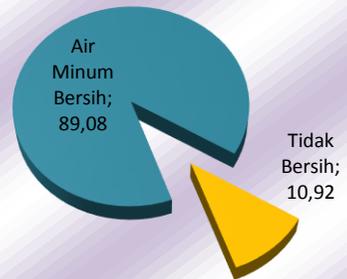
Di samping kualitas rumah, akses rumah tangga terhadap air minum bersih cukup baik. Dari data Susenas 2016, 89 persen rumah tangga yang telah menggunakan sumber air minum bersih. Dari jumlah tersebut, 78 persen di antaranya menggunakan air kemasan/isi ulang, dan ledeng sebagai sumber air minum.

Statistik Perumahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Rumahtangga dengan luas lantai <20 m ² (%)	8,88	5,22	6,73
Rumahtangga menurut kualitas perumahan (%)			
- Lantai tanah	0,47	0,14	0,33
- Atap layak	97,64	98,10	98,69
- Dinding permanen	75,00	79,61	78,67

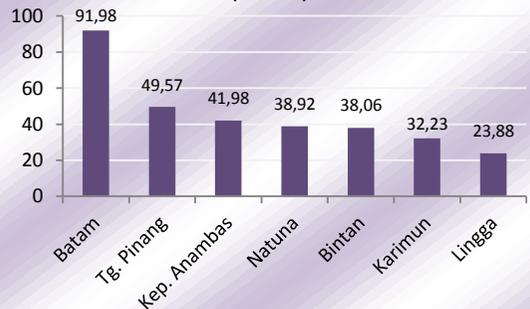
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Bersih, 2016 (Persen)



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Rumah Tangga yang Menggunakan Air Kemasan Bermerk dan Air Isi Ulang Untuk Konsumsi Air Minum Bersih di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (Persen)



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

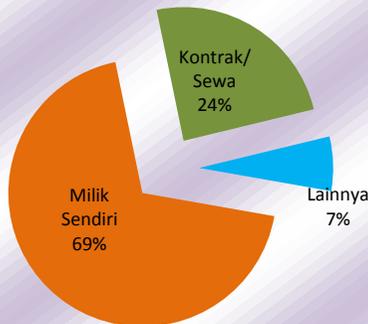
7

PERUMAHAN

Komposisi Rumah Milik Sendiri Meningkat

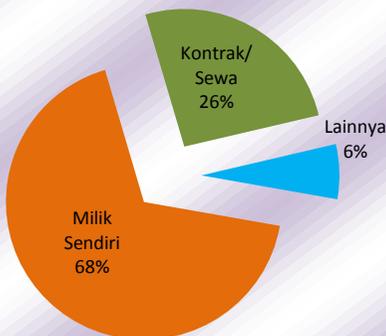
Proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2016 cenderung meningkat, namun yang tinggal dirumah sewa/kontrak cenderung turun.

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (Persen)



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 (Persen)



Sumber: Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2015

Masalah perumahan, tidak hanya sebatas bagaimana orang tersebut bisa tinggal di rumah yang layak. Kemajuan ekonomi dan makin tingginya rasa individualisme membuat faktor kepemilikan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sampai saat ini, kepemilikan rumah sebagian besar hanya bisa diakses oleh penduduk golongan menengah keatas. Sangat jarang penduduk lapisan bawah punya akses untuk memiliki rumah tinggal yang layak.

Selama dua tahun terakhir, status penguasaan bangunan tempat tinggal mengalami perubahan. Terjadi pergeseran distribusi/komposisi status penguasaan bangunan tempat tinggal. Tahun 2016, komposisi bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan bangunan tempat tinggal dengan status sewa/kontrak turun. Perlu ditekankan kembali bahwa yang menurun maupun meningkat di sini bukan jumlah bangunan tempat tinggalnya, tetapi komposisi terhadap total keseluruhan bangunan tempat tinggal menurut status penguasaannya.

Pembangunan Manusia



Perkembangan IPM
Provinsi Kepri

Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi
Kepri Tahun
2016 sebanyak
119.140 Orang



PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terus Meningkat

IPM Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan selama periode 2014-2016 dan selalu berada di atas IPM Indonesia.

8

Manusia sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat tercermin dari seberapa besar peningkatan kualitas manusianya di daerah tersebut. IPM adalah salah satu indikator yang sampai saat ini dipercaya untuk mengukur pembangunan kualitas manusia. Penghitungan IPM meliputi bidang kesehatan (Angka Harapan Hidup), bidang pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), dan bidang ekonomi (Daya Beli per Kapita).

IPM Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan kecenderungan yang meningkat selama 3 tahun terakhir dan patut dibanggakan. IPM Kepulauan Riau di atas IPM Nasional (gambar di samping). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemajuan atau keberhasilan pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Namun demikian, pembangunan manusia tidak berhenti sampai di sini saja, perlu ditingkatkan lagi sampai semua aspek pembangunan manusia mencapai titik idealnya.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 penduduk yang tergolong miskin sebanyak 114,83 ribu jiwa atau sekitar 5,78 persen dari total penduduk, sedangkan di tahun 2016 jumlah penduduk miskin naik menjadi 119,14 ribu jiwa atau 5,84 persen dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau terutama terkonsentrasi di kota seperti Batam. Oleh karena itu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan sebaran penduduk miskin.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2014-2016



Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Statistik Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016

Uraian	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/org/bln)	480 812	502 653
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	114,83	119,14
Penduduk Miskin (%)	5,78	5,84

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Catatan:

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

8

PEMBANGUNAN MANUSIA

Penduduk Miskin Naik

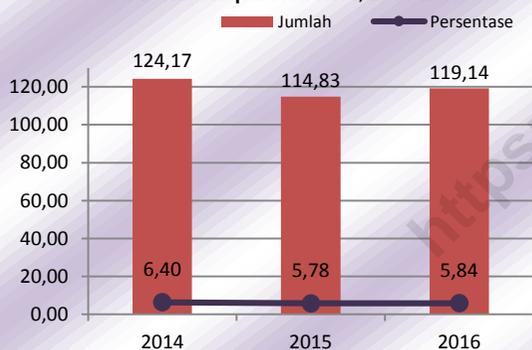
Jumlah penduduk miskin naik dari 5,78 persen pada tahun 2015 menjadi 5,84 persen pada tahun 2016.

Statistik Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
2015-2016

Uraian	2015	2016
	(3)	(3)
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	114,83	119,14
Indeks Keparahan (P2)	0,23	0,71
Indeks Kedalaman (P1)	0,86	0,15

Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016



Sumber : Inkesra Provinsi Kepulauan Riau, 2016

*** Tahukah Anda

Sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan buruh.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Kemiskinan bisa dikatakan sebagai cerminan dari ketidakberhasilan dalam membangun manusia seutuhnya. Kemiskinan yang terjadi tentu merupakan implikasi dari ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah secukupnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (walaupun ada sebagian penduduk mempertahankan kemiskinan karena budaya). Hal ini kemungkinan besar terkait juga dengan pendidikan yang tidak memadai sehingga kemampuan untuk memperoleh pekerjaan menjadi terbatas. Ditambah lagi faktor kesehatan yang secara otomatis tidak dapat dijaga secara optimal.

Walaupun persentase penduduk miskin Kepulauan Riau tahun 2016 meningkat 0,06 persen, namun jika dilihat lebih dalam lagi, indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2) kemiskinan semakin besar yang artinya jarak antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan, serta jarak di antara penduduk miskin semakin membesar/luas.

Keadaan tersebut menuntut kebijakan pemerintah daerah berpihak dan terfokus dalam upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan baik dari pengurangan jumlah penduduk miskin serta mempersempit jarak antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan penduduk miskin lainnya yang ditandai dengan semakin kecilnya nilai indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinannya (P2).

Perbandingan
Jumlah Lahan
Sawah dan Lahan
Bukan Sawah



286,3 Ha



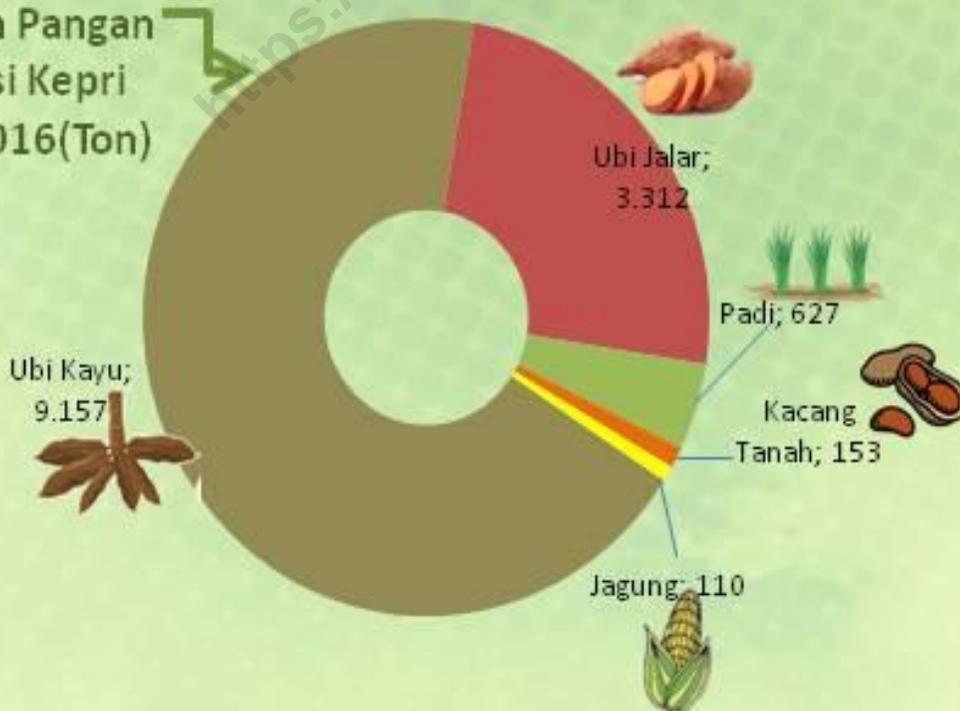
Lahan Sawah

147.383,5 Ha



Lahan Bukan Sawah

Jumlah Produksi
Tanaman Pangan
Provinsi Kepri
Tahun 2016(Ton)



Proporsi Lahan Bukan Sawah Kepulauan Riau Masih Didominasi oleh Lahan Berstatus Sementara Tidak Diusahakan

63 persen lahan bukan sawah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 adalah lahan bukan sawah dengan status sementara tidak diusahakan.

Secara umum, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau ditopang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan Kota Batam sebagai pusatnya. Namun demikian, jika dilihat dari potensi daerah/lokal yang dimiliki maka lapangan usaha pertanian subsektor perikanan merupakan potensi utama yang dimiliki oleh Kepulauan Riau sebagai provinsi yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan.

Walaupun secara kasat mata sebagian besar wilayah Kepulauan Riau merupakan perairan laut, bukan berarti Kepulauan Riau tidak memiliki potensi pertanian daratan. Data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau mencatat bahwa luas lahan sawah di Kepulauan Riau seluas 286,3Ha yang tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas; sedangkan lahan bukan sawah di Kepulauan Riau seluas 147.383,5Ha tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Lahan bukan sawah mendominasi jenis lahan pertanian di Kepulauan Riau dengan proporsi paling besar adalah lahan bukan sawah dengan status sementara tidak diusahakan (63 persen). Hal ini dapat dimaklumi karena lahan di Kepulauan Riau ini tergolong lahan yang kurang subur dengan mengandalkan perairan dari air hujan. Lahan dengan kriteria tersebut hanya cocok untuk lahan perkebunan dimana tanaman tidak membutuhkan air terlalu banyak seperti tanaman perkebunan (kepala sawit, karet, sagu, dll.), tanaman palawija (ubi kayu, jagung) dan tanaman buah (buah naga, mangga, rambutan, durian, dll.). Dapat dipastikan pada musim kemarau dimana debit air hujan berkurang banyak lahan yang sementara tidak diusahakan akan meningkat.

Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (Ha)

Kab/Kota	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)
(1)	(2)	(3)
Karimun	18	13 917
Bintan	3	13 568,8
Natuna	158	40 711
Lingga	51,3	52 355,7
Anambas	56	18 209
Batam	-	3 567
Tjpinang	-	5 055
Jumlah	286,3	147 383,5

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Lahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (Ha)

Jenis Lahan	Lahan Bukan Sawah (Ha)
(1)	(2)
Tegal/Kebun	34 316,8
Ladang/Huma	19 639
Sementara Tidak Diusahakan	93 427,7
Jumlah	147 383,5

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

9

PERTANIAN

Produktivitas Tanaman Pangan Menurun

Produktivitas padi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan di tahun 2016 baik dari luas panen dan hasil produksinya.

**Statistik Tanaman Pangan
Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016**

Uraian	2015	2016
Padi		
Luas panen (ha)	263	186
Produksi (ton)	959	627
Jagung		
Luas panen (ha)	203	61
Produksi (ton)	473	110
Ubi kayu		
Luas panen (ha)	708	708
Produksi (ton)	9 157	9 157
Ubi jalar		
Luas panen (ha)	224	184
Produksi (ton)	1 795	3 312
Kacang tanah		
Luas panen (ha)	153	153
Produksi (ton)	153	153

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi geografis daerah kepulauan dan kondisi tanah di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tanah tandus (produktivitasnya rendah). Kondisi tanah di Kepulauan Riau didominasi oleh tanah merah yang mengandung mineral bauksit sehingga kurang cocok dijadikan lahan sawah.

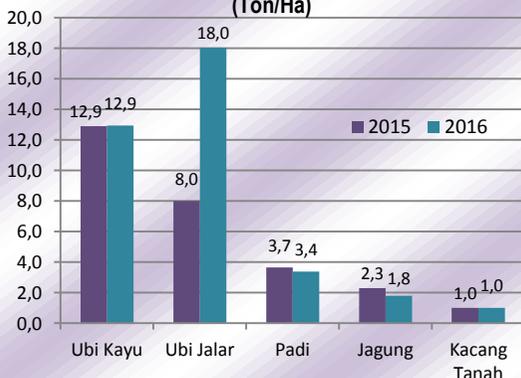
Keadaan tanah di Provinsi Kepulauan Riau tersebut menjadi faktor penyebab produksi tanaman pangan (padi) yang rendah sehingga provinsi ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik. Tahun 2016, tanaman ubi jalar mempunyai produktivitas paling tinggi, kemudian tanaman ubi kayu dan tanaman padi di urutan ketiga.

Luas panen dan produksi tanaman pangan Provinsi Kepulauan Riau untuk semua komoditas mengalami penurunan pada tahun 2016. Hanya komoditas ubi jalar yang mengalami peningkatan jumlah produksi meskipun luas panennya berkurang. Jagung mengalami penurunan produksi tertinggi pada tahun 2016 menjadi 110 ton dibandingkan tahun sebelumnya 473 ton.

Untuk tanaman pangan utama padi, luas panen tahun 2016 menurun menjadi 186 hektar, dibandingkan tahun lalu 263 hektar. Dan dari sisi produksi juga mengalami penurunan dari 959 ton pada tahun 2015 menjadi 627 ton pada tahun 2016.

Dari sisi produktivitas, pada tahun 2016 produktivitas padi di Kepulauan Riau mencapai 3,7 ton perhektar, jauh di bawah produktivitas ubi jalar dan ubi kayu yang masing-masing sebesar 18,0 ton perhektar dan 12,9 ton perhektar.

**Produktivitas Tanaman Pangan
Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016
(Ton/Ha)**

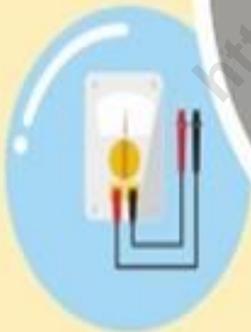


Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

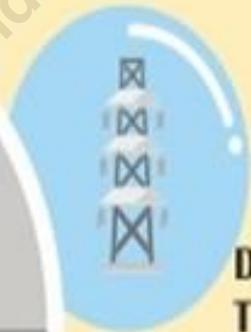


BAB 10. LISTRIK DAN AIR

**Pemakaian
Listrik :
25 Ribu KVA**



**Daya
Tersambung :
166 Ribu KVA**



LISTRIK DAN AIR

Jumlah pelanggan PT.PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang Tahun 2016 Meningkat

Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang tahun 2016 naik sebesar 14 persen.

10

Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu akan membutuhkan sarana pendukung, seperti sumber energi yang cukup besar. Sumber energi yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah listrik dan air.

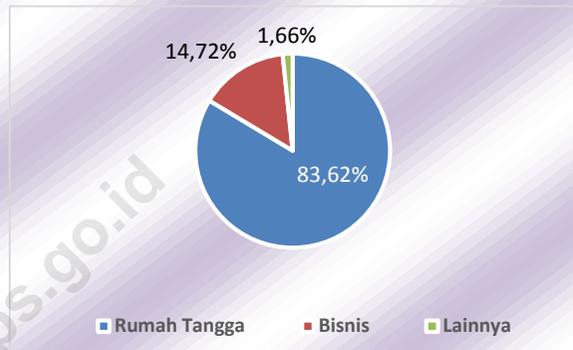
Listrik memegang peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau maka semakin bertambah pula jumlah pelanggan listrik PT. PLN.

Secara umum jumlah pelanggan listrik PT. PLN Cabang Kota Tanjungpinang tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan PT. PLN Cabang Kota Tanjungpinang tahun 2016 sebanyak 76.793 pelanggan atau naik 14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah pelanggan listrik PT. PLN Cabang Kota Tanjungpinang terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu: rumah tangga, bisnis, industri, dan umum. Rumah tangga menduduki proporsi pelanggan terbesar, yakni menguasai 83,62 persen pada tahun 2016, kemudian disusul oleh bisnis, dan lainnya.

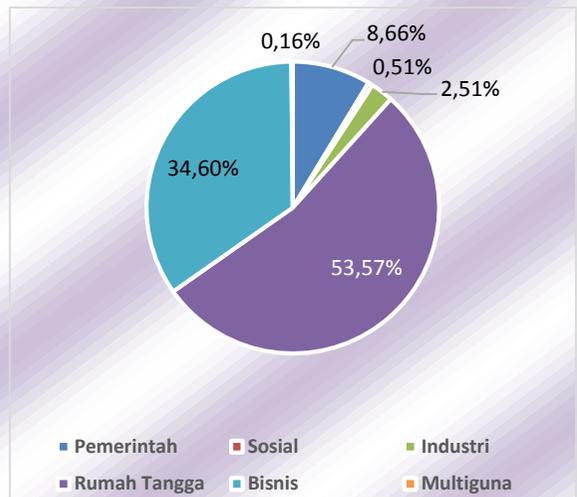
Tenaga listrik yang digunakan didominasi oleh rumah tangga sebesar 53,57 persen. Selain listrik, sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah air bersih. Produksi air bersih dipenuhi oleh Perusahaan Air Minum Tirta Kepri di Tanjungpinang.

Distribusi Pelanggan PT. PLN Cabang Tanjungpinang menurut Tipe Pelanggan, 2016 (persen)



Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2017

Distribusi Tenaga Listrik yang Digunakan di PT. PLN Cabang Tanjungpinang menurut Pelanggan, 2016 (persen)



Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2017

10

LISTRIK DAN AIR

Rumah Tangga sebagai Konsumen Energi Terbesar

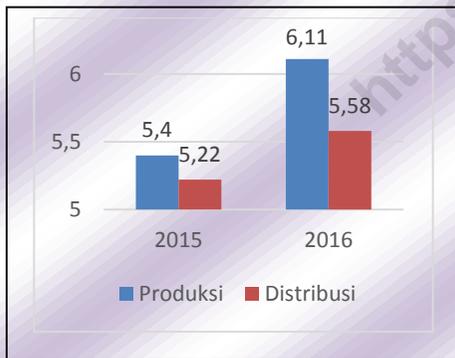
Lebih dari setengah distribusi air di Tanjungpinang disalurkan ke rumah tangga.

Persentase Penggunaan Air Bersih menurut Golongan Pemakaian di Kota Tanjungpinang, 2015-2016 (persen)



Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2017

Produksi dan Distribusi Air Bersih di Kota Tanjungpinang, 2015-2016 (Juta m³)



Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2017

Kapasitas produksi air yang disalurkan oleh Tirta Kepri di Tanjungpinang tahun 2016 sebesar 5,58 juta m³ mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,22 juta m³. Sementara itu, jumlah penggunaannya pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan.

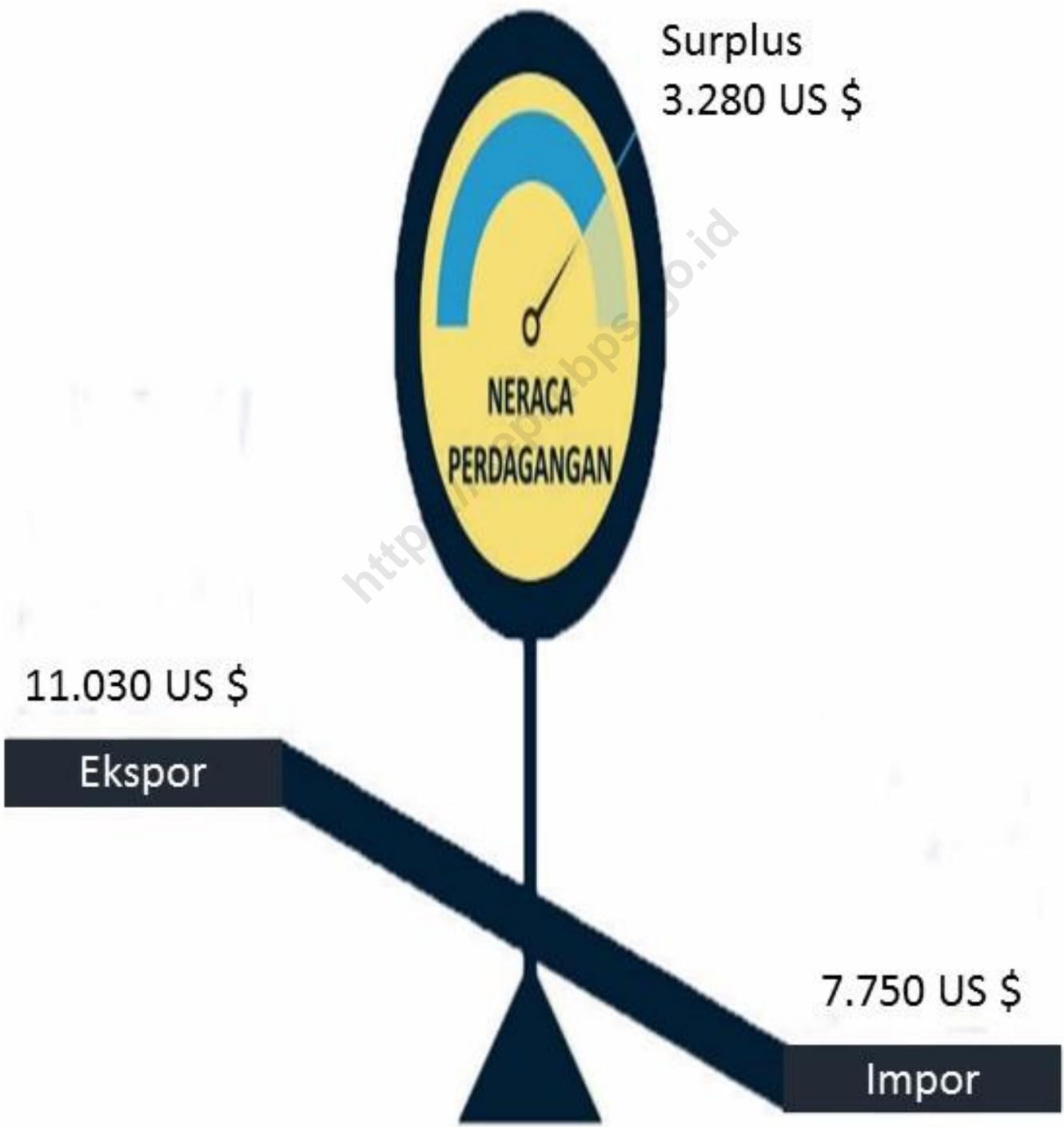
Persentase penggunaan air bersih terbesar di Tanjungpinang pada periode 2015-2016 adalah rumah tangga, kemudian diikuti oleh perusahaan niaga, dan lainnya yang mencakup instansi pemerintah, sosial/umum, industri, dan pelabuhan udara.

Produksi dan distribusi air bersih di Kota Tanjungpinang pada periode 2015-2016 selalu mengalami peningkatan.

*** Tahukah Anda

Kapasitas produksi air pada PDAM Tirta Kepulauan Riau di Tanjungpinang mencapai 5,58 juta m³ pada tahun 2016.

BAB II. PERDAGANGAN



PERDAGANGAN

11

Mesin/Peralatan Listrik Memberikan Kontribusi Nilai Ekspor Terbesar

Mesin/peralatan listrik tetap menjadi komoditas terbesar yang mendominasi pangsa pasar ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga mencapai 29,28 persen.

Peranan ekspor bagi sebuah daerah dengan perekonomian terbuka tentu amatlah penting. Demikian pula halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau. Ekspor barang merupakan penggerak utama perekonomian yang perdagangannya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Hal ini memberi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi Kepulauan Riau.

Pada grafik di samping ini dapat dilihat selama periode 2014-2016, perkembangan volume dan nilai ekspor Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 volume ekspor mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014, tetapi pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan.

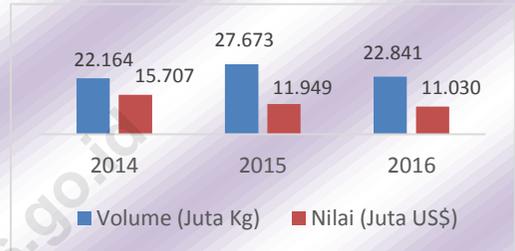
Berdasarkan komoditas utama, ada lima kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Komoditi ekspor pertama terbesar adalah mesin/peralatan listrik, bahan bakar mineral, mesin/pesawat mekanik, benda-benda dari besi/baja, serta minyak dan lemak hewan/nabati.

Singapura masih menjadi pasar utama tujuan ekspor terbesar dari Provinsi Kepulauan Riau. Nilai kontribusi ekspor ke Singapura sebesar 52,69 persen terhadap keseluruhan ekspor. Kemudian diikuti oleh Australia, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia, dan seterusnya. Kelima negara tersebut menjadi tujuan ekspor terbesar. Singapura mendominasi hingga lebih dari separuh total ekspor Kepulauan Riau pada tahun 2016.

*** Tahukah Anda

Pada Tahun 2016, volume ekspor Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 21,15 persen.

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016



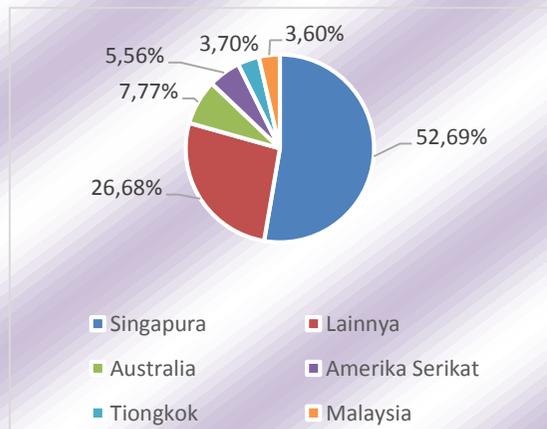
Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Nilai dan Kontribusi Lima Kelompok Komoditas Ekspor Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Uraian	Nilai(juta US\$)	Kontribusi (%)
Mesin/Peralatan Listrik	2 427	29,28
Bahan Bakar Mineral	2 349	28,15
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	1 758	21,21
Benda-benda dari Besi/Baja	1 056	12,74
Minyak, Lemak Hewan/Nabati	698	8,42

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Persentase Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau menurut Negara Tujuan, 2017 (persen)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

PERDAGANGAN

Mesin/Peralatan Listrik Merupakan Impor Terbesar Kepulauan Riau

Mesin/peralatan listrik merupakan komoditas utama dalam pangsa pasar impor Kepulauan Riau yang mencapai 26,31 persen dari keseluruhan total impor.

Statistik Ekspor dan Impor di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (juta US\$)

Uraian	2014	2015	2016
- Ekspor (juta US\$)	15 707	11 949	11 030
- Impor (juta US\$)	10 877	8 462	7 750
- Surplus (juta US\$)	4 830	3 487	3 280

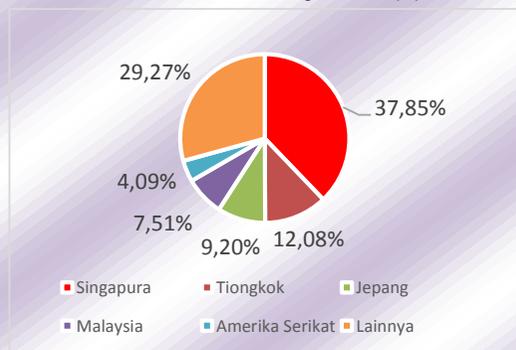
Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Nilai dan Kontribusi Lima Kelompok Komoditas Impor Terbesar Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Uraian	Nilai(juta US\$)	Kontribusi (%)
Mesin/Peralatan Listrik	2 139	27,59
Mesin/Pesawat Mekanik	1 259	16,25
Bahan Bakar Mineral	1 115	14,38
Benda dari Besi dan Baja	771	9,95
Kapal Laut	244	3,15

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Persentase Nilai Impor Provinsi Kepulauan Riau menurut Asal Negara, 2016 (%)



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Pada Tahun 2016, neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan surplus sebesar 3.280 juta US\$ dengan nilai ekspor sebesar 11.030 juta US\$ dan nilai impor sebesar 7.750 juta US\$. Selama kurun waktu 2014-2016, statistik ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan nilai surplus.

Pada tahun 2016, lima kelompok komoditi impor terbesar Provinsi Kepulauan Riau adalah: mesin/peralatan listrik, mesin/pesawat mekanik, bahan bakar mineral, benda dari besi dan baja, serta kapal laut. Komoditi impor mesin/peralatan mekanik memberikan kontribusi impor Kepulauan Riau terbesar dengan nilai 27,59 persen dari total impor seluruhnya.

Persentase nilai impor terbesar Kepulauan Riau berasal dari negara Singapura, yaitu sebesar 37,85 persen dan Tiongkok sebesar 12,08 persen. Sementara itu, untuk negara Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat memiliki nilai impor kurang dari 10 persen.

Singapura selain menjadi pangsa ekspor terbesar, juga menjadi pangsa impor terbesar di Kepulauan Riau. Nilai impor dari negara Singapura sebesar 2.933 juta US\$ atau mencapai 37,85 persen dari keseluruhan nilai impor di Kepulauan Riau.

*** Tahukah Anda

Nilai ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Riau ke negara Singapura pada tahun 2016 mempunyai persentase terbesar jika dibandingkan dengan negara lainnya.

BAB 12.

KONSTRUKSI



Jumlah Perusahaan Konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2016 Naik Sebanyak 245 Perusahaan

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel, terowongan, bangunan air, drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik, komunikasi, dan lain-lain.

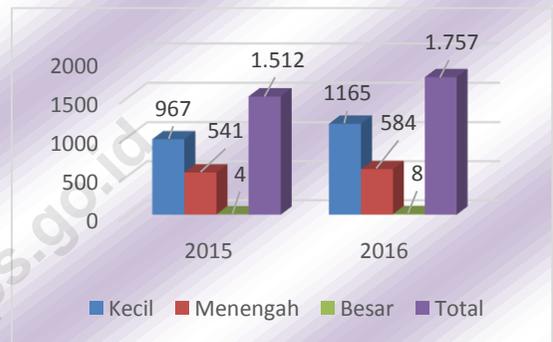
Kegiatan perusahaan konstruksi digolongkan menjadi 3 golongan yaitu: perusahaan konstruksi kecil dengan skala nilai pekerjaan 0 - 2,5 miliar rupiah, perusahaan konstruksi menengah dengan skala nilai pekerjaan 0 - 10 miliar rupiah, dan perusahaan konstruksi besar dengan skala nilai pekerjaan 0 - tak terbatas miliar rupiah.

Jumlah perusahaan konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau secara total mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ada 1.512 perusahaan, naik sebanyak 245 perusahaan menjadi 1.757 perusahaan konstruksi pada tahun 2016. Hal ini seiring juga dengan peningkatan perusahaan konstruksi untuk skala kecil. Jumlah perusahaan konstruksi skala kecil naik sebanyak 545 perusahaan dan skala menengah juga naik sebanyak 43 perusahaan pada tahun 2016. Sementara itu, untuk perusahaan skala besar meningkat sebanyak 4 perusahaan pada tahun 2016.

Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/ kehadiran pekerja tersebut.

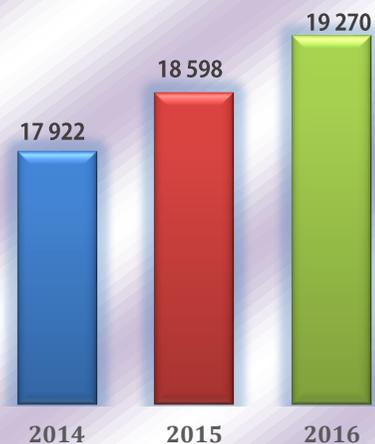
Selama periode tahun 2014-2016, jumlah pekerja tetap yang bekerja di perusahaan konstruksi mempunyai *trend* yang meningkat. Pada tahun 2015 jumlah pekerja tetap yang bekerja di perusahaan konstruksi sebanyak 18.598 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 672 orang pada tahun 2016 dan menjadi 19.270 orang pekerja tetap perusahaan konstruksi.

Jumlah Perusahaan Konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau menurut Jenis Golongannya, 2015-2016 (unit)



Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan Konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau, 2014 – 2016 (orang)



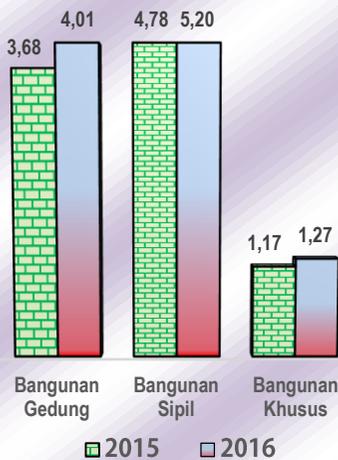
Sumber : Statistik Indonesia, 2017

12

KONSTRUKSI

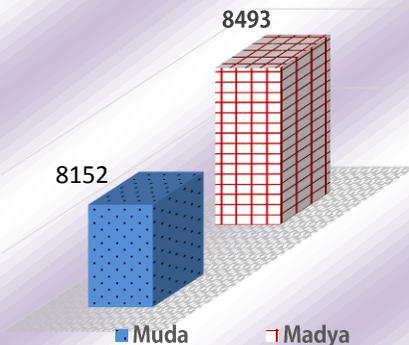
Nilai Konstruksi untuk Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, dan Bangunan Khusus di Kepulauan Riau Cenderung Meningkatkan di Tahun 2016

Nilai Konstruksi menurut Bidang Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (Triliun Rupiah)



Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Jumlah Tenaga Ahli Sektor Konstruksi menurut Kualifikasi Keahliannya di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (orang)



Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Konstruksi menurut bidang pekerjaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: jenis pekerjaan bangunan gedung, bangunan sipil, dan bangunan khusus. Selama tahun 2015-2016, nilai konstruksi menurut bidang pekerjaan yang telah diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami peningkatan.

Dari ketiga jenis nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2015-2016 itu, nilai konstruksi untuk bangunan sipil mempunyai nilai yang terbesar. Nilai konstruksi bangunan sipil yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4,78 triliun meningkat menjadi Rp. 5,20 triliun pada tahun 2016.

Nilai konstruksi yang diselesaikan untuk bangunan gedung pada tahun 2015 sebesar Rp. 3,68 triliun rupiah meningkat menjadi Rp. 4,01 triliun rupiah pada tahun 2016. Sementara itu, nilai konstruksi yang diselesaikan untuk bangunan khusus juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, nilai konstruksi yang diselesaikan adalah sebesar Rp. 1,17 triliun, meningkat menjadi Rp. 1,27 triliun pada tahun 2016.

Sertifikat Konstruksi Ahli (SKA) adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja yang berdasarkan tingkat pendidikan dan lamanya bekerja. Kualifikasi tenaga ahli untuk sektor konstruksi adalah tenaga ahli pemula, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

Pada tahun 2016, jumlah tenaga ahli di sektor konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya berjumlah 16.645 orang yang terdiri dari tenaga ahli muda berjumlah 8.152 orang dan tenaga ahli madya berjumlah 8.493 orang.

*** Tahukah Anda

Belum ada tenaga ahli utama sektor konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016.

BAB 13. HOTEL DAN PARIWISATA

Wisatawan
Mancanegara

52,76 %

13,01 %



4,81 %



4,19 %



HOTEL DAN PARIWISATA

Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Sedikit Mengalami Penurunan

Negara Singapura masih mendominasi jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2014-2016.

13

Selama periode 2015–2016, sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah seluruh wisman yang berkunjung sebanyak 1,86 juta orang. Jumlah ini meningkat sebesar 92 ribu orang dari tahun sebelumnya.

Walaupun peningkatan jumlah kunjungan wisman belum tentu berkorelasi positif dengan jumlah devisa yang mampu diraih karena hal tersebut terkait dengan daya beli, namun peningkatan jumlah kunjungan wisman secara konsisten setidaknya bisa dijadikan indikasi bahwa Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu pilihan wisata favorit di kawasan Asia Tenggara.

Jika dilihat dari negara asalnya, kontributor utama kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami pergeseran. Selama tiga tahun terakhir Singapura masih mendominasi wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.

Dari 10 negara terbesar yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau ada 5 negara yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu: Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, dan India.

Pada tahun 2015 persentase wisman dari Singapura sebesar 53,70 persen, diikuti Malaysia dengan 13,27 persen, Tiongkok dengan 5,13 persen, Korea Selatan dengan 3,77 persen, dan India dengan 3,30 persen.

Provinsi Kepulauan Riau secara terus menerus mempromosikan sektor pariwisatanya dengan giat agar wisatawan dari mancanegara lebih tertarik lagi dan selalu ingin berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.

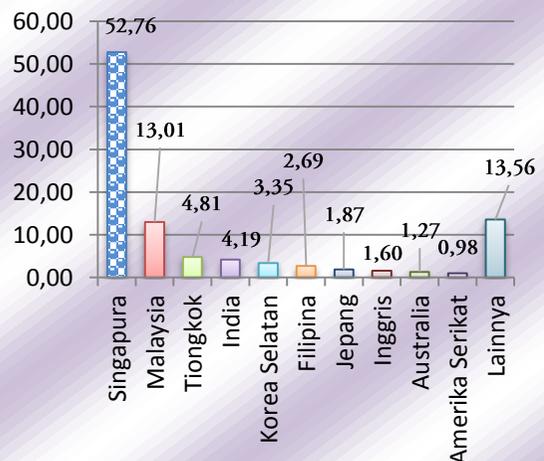
Kota Batam masih menjadi pintu gerbang utama masuknya wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini pula yang menjadi daya tarik pengusaha perhotelan di Provinsi Kepulauan Riau lebih suka berinvestasi di Kota Batam dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Banyaknya Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaannya di Provinsi Kepulauan Riau, 2014 – 2016 (orang)

Negara	2014	2015	2016
Singapura	1 042 730	1 094 220	1 013 023
Malaysia	270 058	270 310	249 848
Tiongkok	104 469	104 473	92 322
Korea Selatan	79 727	76 895	64 283
India	63 718	67 304	80 479
Filipina	52 276	52 444	51 592
Jepang	42 606	39 723	34 206
Inggris	30 630	32 345	30 754
Australia	25 545	24 489	24 431
Amerika Serikat	20 606	19 608	18 847
Lainnya	241 060	255 862	260 447
Jumlah	1 973 425	2 037 673	1 920 232

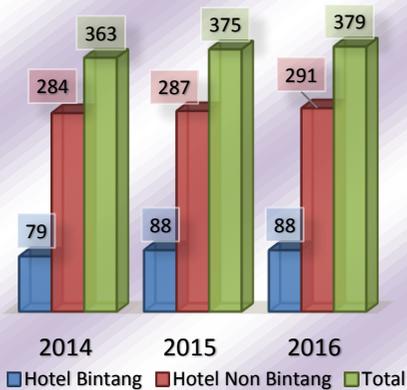
Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Persentase Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaannya di Provinsi Kepulauan Riau, 2016



Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Jumlah Hotel Bintang dan Non-Bintang di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (unit)



Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Rata-Rata Lamanya Menginap Wisatawan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (hari)

Uraian	2014	2015	2016
- Wisman	2,10	1,92	2,15
- Wisnus	2,02	1,83	1,74
-Total	2,05	1,88	1,96

Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Hotel adalah penyedia akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang.

Perkembangan hotel bintang dan non-bintang di Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah hotel seluruhnya ada 379 hotel. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 4 hotel jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 375 hotel.

Rata-rata lamanya menginap wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 1,96 hari, dengan rata-rata lama menginap wisman adalah 2,15 hari dan rata-rata lama menginap wisnus adalah 1,74 hari.

Hal ini tentu harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan memberikan fasilitas dan akomodasi yang baik kepada wisman dan wisnus sehingga tingkat hunian dan lamanya menginap di hotel ikut meningkat secara signifikan.

*** Tahukah Anda

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rata-rata lama menginap wisnus di Kepulauan Riau selalu mengalami penurunan.

BAB 14

TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

BANDARA HANG NADIM BATAM

Berangkat: 2.783.192 orang

Datang: 3.014.832 orang



PELABUHAN BATAM CENTER HARBOR

Berangkat: 1.761.606 orang

Datang: 1.769.018 orang



TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

14

Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Seluruhnya adalah 5.115 Km yang Meliputi jalan Negara, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten/Kota

Meningkatnya kegiatan perekonomian, maka menuntut peningkatan ketersediaan jalan dalam rangka memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara otomatis akan memberi dampak yang positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Apalagi bagi Provinsi Kepulauan Riau yang bisa dikatakan sebagai etalase pariwisata di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan tentu sangatlah penting. Selama periode tahun 2014 – 2016 tidak ada penambahan pembangunan jalan raya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya untuk pembangunan jalan Negara dan jalan provinsi.

Untuk transportasi udara, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai setidaknya empat bandara udara, antara lain: Bandara Internasional Hang Nadim yang berada di Kota Batam, Bandara Raja Haji Fisabilillah yang berada di Kota Tanjungpinang, Bandara Ranai yang berada di Kabupaten Natuna, dan Bandara Dabo yang berada di Kabupaten Lingga.

Pada tahun 2016, jumlah penumpang domestik yang berangkat dan datang melalui Bandara Hang Nadim-Batam cenderung meningkat. Penumpang domestik yang berangkat sebanyak 2,783 juta orang dan yang datang sebanyak 3,014 juta orang. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dan datang melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah-Tanjungpinang juga mengalami peningkatan. Penumpang domestik yang berangkat sebanyak 132 ribu orang dan yang datang sebanyak 141 ribu orang.

Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (km)

Kewenangan	2014	2015	2016
- Negara	587	587	587
- Provinsi	895	895	895
- Kabupaten/Kota	4 150	3 856	3 633
- Total	5 632	5 338	5 115

Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Banyaknya Penumpang Domestik yang Berangkat dan Datang menurut Bandara Udara di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (orang)

Bandara	2015	2016
Bandara Hang Nadim-Batam		
- Berangkat	2 313 450	2 783 192
- Datang	2 489 168	3 014 832
Bandara Raja Haji Fisabilillah-Tanjungpinang		
- Berangkat	125 100	132 237
- Datang	132 539	141 457

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Banyaknya Penumpang Luar Negeri yang Berangkat dan Tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura-Tanjungpinang Mengalami Peningkatan pada Tahun 2016

Banyaknya Penumpang Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Berangkat dan Tiba menurut Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (orang)

Pelabuhan Laut	2015	2016
Sri Bintan Pura-Tanjungpinang		
Dalam Negeri		
- Berangkat	436 490	504 767
- Tiba	402 134	515 471
Luar Negeri		
- Berangkat	205 565	251 292
- Tiba	216 786	266 740
Tanjung Balai Karimun		
Dalam Negeri		
- Berangkat	345 458	793 471
- Tiba	333 880	710 943
Luar Negeri		
- Berangkat	428 105	334 128
- Tiba	513 066	330 515

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Banyaknya Penumpang yang Berangkat dan Tiba menurut Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016 (orang)

Pelabuhan Laut	2015	2016
Batam Center Harbor		
- Berangkat	1 874 060	1 761 606
- Tiba	1 721 554	1 769 018
Tarempa-Anambas		
- Berangkat	33 069	36 753
- Tiba	32 597	32 560

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data Statistik Angkutan Laut di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, jumlah penumpang dalam negeri yang berangkat dan tiba di pelabuhan Sri Bintan Pura mengalami peningkatan. Demikian juga untuk penumpang luar negeri yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentu berhubungan langsung dengan meningkatnya wisatawan mancanegara yang datang di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk penumpang dari dalam negeri yang berangkat dan tiba melalui pelabuhan laut Tanjung Balai Karimun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sementara itu, untuk penumpang luar negeri yang berangkat dan tiba di pelabuhan laut Tanjung Balai Karimun justru mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya wisatawan dari Negara Singapura dan Malaysia yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau ini, tidak lepas dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Pulau Batam dan mudahnya akses lewat angkutan laut dengan kapal feri di pelabuhan laut Sri Bintan Pura, Tanjung Balai Karimun, dan Batam Center.

Banyaknya penumpang yang berangkat dari pelabuhan laut Batam Center Harbor pada tahun 2016 ada 1,762 juta orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 1,874 juta orang. Sementara itu, penumpang yang tiba sebanyak 1,769 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 1,721 juta orang.

Untuk penumpang yang berangkat dari pelabuhan Tarempa-Anambas meningkat pada tahun 2016, tetapi sebaliknya jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan Tarempa-Anambas justru mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015.

BAB 15. PERBANKAN DAN INVESTASI



Dana Simpanan Bank Pemerintah
Rp. 19.725 Miliar

Dana Simpanan Bank Swasta
Rp. 23.148 Miliar

PERBANKAN DAN INVESTASI

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Sedikit Mengalami Penurunan

15

Perbankan memiliki fungsi intermediasi, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak lain baik untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Hal inilah yang membuat perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian, disamping perbankan sendiri mampu menciptakan nilai tambah yang juga tidak bisa dikatakan kecil.

Pada tahun 2016, jumlah kantor bank di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 418 unit, berkurang sebanyak 1 unit bank jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana simpanan perbankan terus mengalami peningkatan dalam kurun tiga baik itu Bank Pemerintah, Bank Swasta, maupun BPR. Posisi pinjaman perbankan pada tahun 2016, penggunaannya 31,87 persen untuk modal kerja, 26,15 persen untuk investasi, dan 41,99 persen untuk konsumsi.

Di sisi lain, realisasi investasi juga menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. PMA dan PMDN pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan nilai investasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*** Tahukah Anda

Bank Swasta Nasional memegang peran penting bagi ekonomi Kepulauan Riau karena dominasinya dalam mengumpulkan dana simpanan masyarakat.

Dana Simpanan Perbankan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (miliar rupiah)



Sumber : Bank Indonesia

Statistik Perbankan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (unit)

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Kantor Bank			
- Pemerintah	113	170	170
- Bank Pemerintah Daerah	22	37	37
- Bank Swasta Nasional	87	131	131
- Bank Asing dan Campuran	2	9	9
- Bank Perkreditan Rakyat	69	72	71

Sumber : Bank Indonesia

Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
PMA (juta US\$)	392,1	640,4	519,1
PMDN (milyar Rp)	28,5	612,1	492,5

Sumber :Badan Koordinasi Penanaman Modal

PERBANKAN DAN INVESTASI

Pinjaman Perbankan untuk Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel Masih Mendominasi

Sektor perdagangan, restoran, dan hotel memperoleh pinjaman paling besar karena sektor ini cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

Posisi Pinjaman Perbankan menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (miliar rupiah)



Sumber : Bank Indonesia

Pinjaman Perbankan menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (juta rupiah)

Uraian	2014	2015	2016
Pertanian	115 086	194 191	172 706
Pertambangan dan Penggalian	496 420	303 961	235 250
Industri	4 614 014	4 325 060	4 590 992
Listrik, Gas, dan Air	735 983	285 575	923 127
Konstruksi	1 579 501	1 526 601	1 679 827
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	6 342 463	7 293 650	7 847 376
Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi	7 308 490	4 485 519	3 880 504
Jasa-Jasa Dunia Usaha	1 185 447	2 098 657	2 104 281
Jasa-Jasa Sosial Masyarakat	653 879	488 680	461 650
Lain-Lain	13 355 847	15 032 964	16 423 957
Total	33 388 130	36 034 856	38 316 668

Sumber : Bank Indonesia

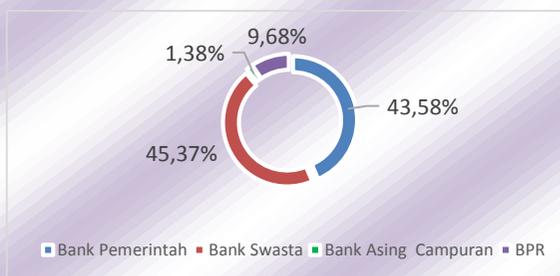
Pada tahun 2016, dilihat dari penggunaannya pinjaman perbankan yang diberikan oleh Bank Pemerintah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagian besar adalah untuk keperluan konsumsi, sedangkan oleh Bank Swasta penggunaannya sebagian besar untuk modal kerja. Untuk itu peran pemerintah masih tetap diperlukan dalam merangsang tumbuhnya investasi, baik dengan cara memberikan kemudahan atau bahkan *reward* bagi penanaman investasi terutama investor dalam negeri dan yang paling penting adalah menciptakan iklim investasi yang baik agar para investor merasa aman berinvestasi di provinsi ini.

Jika dilihat menurut sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel tercatat sebagai sektor yang memperoleh pinjaman terbesar. Sektor berikutnya adalah sektor industri. Kondisi ini terkait dengan penggerak ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang paling erat. Di sisi lain, penyaluran pinjaman menurut sektor mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada sektor pertanian; sektor perdagangan, restoran, dan hotel; sektor jasa-jasa dunia usaha; dan sektor lain-lain.

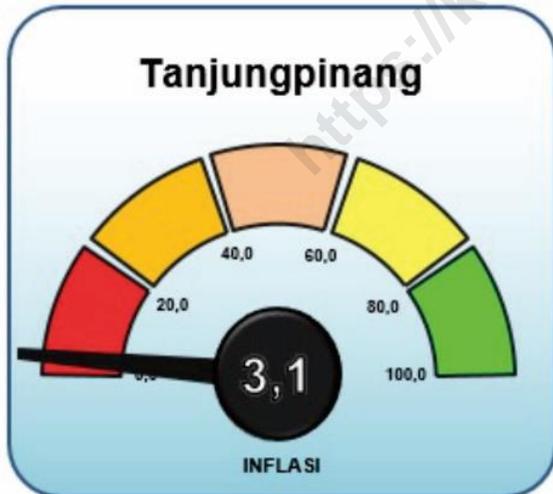
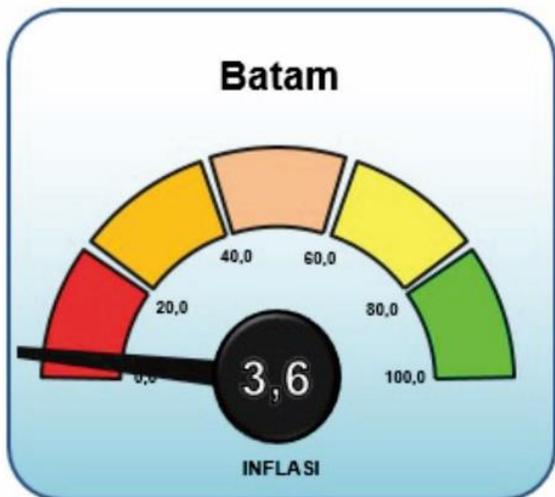
Dilihat dari sisi aktiva pada tahun 2015, bank swasta mempunyai porsi aktiva paling besar terhadap total aktiva seluruh perbankan yaitu 44,68 persen, di atas bank pemerintah yang senilai 44,28 persen, bank perkreditan rakyat 9,55 persen, serta bank asing dan campuran yang hanya 1,49 persen.

Posisi Aktiva Perbankan menurut Kelompok Bank di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 (%)



Sumber : Bank Indonesia

BAB 16. HARGA - HARGA



Inflasi Tahun 2016



HARGA-HARGA

Pada Tahun 2016, Inflasi Kota Batam Lebih Tinggi Dibandingkan dengan Kota Tanjungpinang

Rendahnya inflasi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 disebabkan penurunan harga pada kelompok transportasi dan komunikasi.

16

Kota Batam dan Tanjungpinang merupakan dua kota yang menghitung inflasi di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Kota Batam, pada tahun 2016 mengalami inflasi sebesar 3,61 persen.

Penurunan inflasi tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipicu oleh turunnya semua inflasi kelompok pengeluaran kecuali kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami inflasi hingga 6,21 persen.

Untuk Kota Tanjungpinang, inflasi yang terjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Batam, yaitu sebesar 3,06 persen. Penurunan inflasi Kota Tanjungpinang tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan turunnya inflasi pada semua kelompok kecuali kelompok perumahan; kelompok kesehatan; serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga. Sementara itu, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi hingga 2,4 persen yang turut juga memberikan andil penurunan laju inflasi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2016.

*** Tahukah Anda

Tingkat kenaikan harga di Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Batam.

Laju Inflasi Kota Batam, 2014-2016 (%)

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016
Umum	7,61	4,73	3,61
Bahan Makanan	6,04	10,09	3,15
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,50	5,95	4,38
Perumahan	9,32	3,83	2,59
Sandang	4,27	0,56	0,99
Kesehatan	14,83	0,95	0,44
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	9,76	3,15	3,07
Transportasi dan Komunikasi	13,39	2,04	6,21

Sumber : BPS

Laju Inflasi Kota Tanjungpinang, 2014-2016 (%)

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016
Umum	7,49	2,46	3,06
Bahan Makanan	6,18	5,65	4,99
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,97	6,76	5,56
Perumahan	8,23	1,24	2,45
Sandang	3,49	5,73	3,26
Kesehatan	11,04	3,52	4,67
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,01	1,48	2,12
Transportasi dan Komunikasi	13,44	-6,21	-2,4

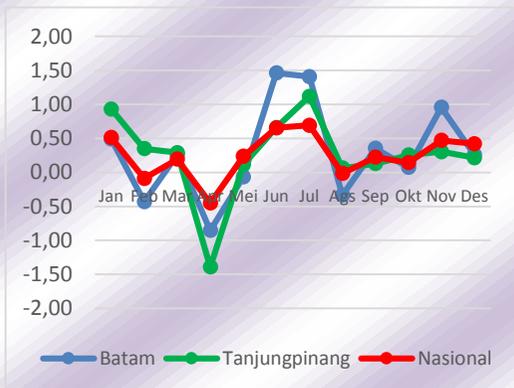
Sumber : BPS

HARGA-HARGA

Petani Provinsi Kepulauan Riau Mengalami Defisit

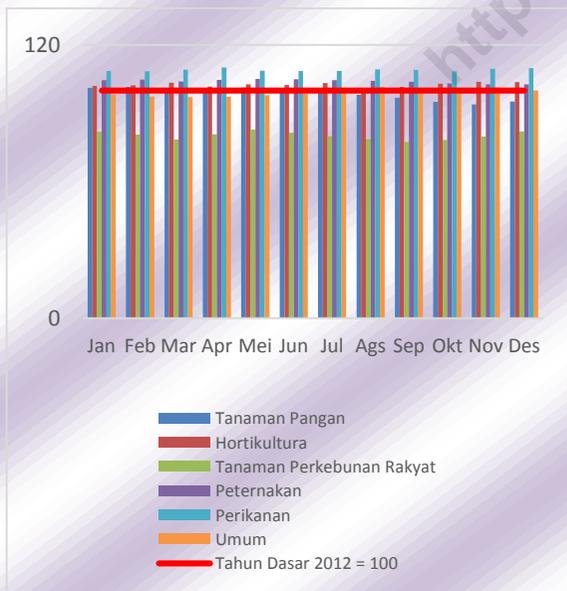
NTP tanaman pangan dan tanaman perkebunan menunjukkan angka di bawah 100, sedangkan ketiga sektor lainnya menunjukkan angka di atas 100.

Inflasi Batam, Tanjungpinang, dan Nasional Tahun 2016 (%)



Sumber : BPS

Nilai Tukar Petani di Kepulauan Riau, 2016



Sumber : BPS

Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, maka pergerakan harga di tingkat pedesaan juga relatif sejalan. Namun jika dilihat besarnya, tekanan harga di daerah perkotaan tampak lebih berat.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan daya tukar/kesejahteraan petani menunjukkan bahwa selama tahun 2014 indeksinya di bawah 100, sehingga dikatakan bahwa kondisi petani sudah sedikit kurang baik jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebagai tahun dasar.

Dari lima sub sektor (tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan), petani yang mengusahakan tanaman pangan dan tanaman perkebunan masih memiliki indeks dibawah 100. Sementara itu, petani ketiga sub sektor lainnya memiliki nilai indeks di atas 100.

Selama tahun 2016, petani yang mengusahakan perikanan memiliki indeks tertinggi dibandingkan dengan petani sub sektor lainnya. Hal ini sebanding dengan semakin meningkatnya produksi perikanan provinsi ini yang kemudian kedepannya dapat membantu mensejahterakan para nelayan.

Namun, peran pemerintah harus terus ditingkatkan agar para petani sub sektor lainnya juga dapat terus meningkatkan hasil produksinya sehingga dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan antar-petani.

*** Tahukah Anda

Indeks yang dibayar petani mencakup komponen konsumsi rumah tangga dan penambahan barang modal. Indeks yang diterima petani mencakup penerimaan yang berasal dari seluruh sub sektor pertanian.

BAB 17. PENGELUARAN PENDUDUK



PERUMAHAN



30,46 %



KESEHATAN



1,35 %



PAJAK



2,66 %



PAKAIAN



3,01 %



PENDIDIKAN



3,29 %

PENGELUARAN NON MAKANAN

PENGELUARAN PENDUDUK

17

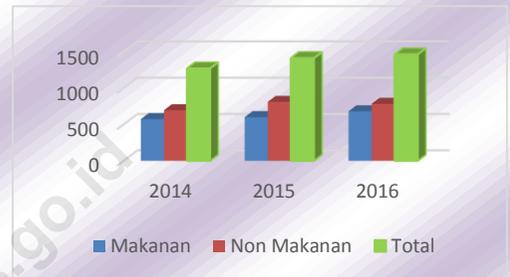
Pada Tahun 2016, Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Masih Didominasi oleh Non Makanan 53,48 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk kebutuhan non makanan, sedangkan sisanya 46,52 persen untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Menurut kaidah ekonomi, pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan besarnya pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter seringkali didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara nominal memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 pengeluaran per kapita per bulan baru mencapai Rp 1,34 juta per kapita per bulan, maka pada tahun 2016 naik menjadi Rp 1,46 juta per kapita per bulan. Sementara itu, kuantitas pola konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sedikit mengalami perubahan. Rata-rata konsumsi kalori dan rata-rata konsumsi protein mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

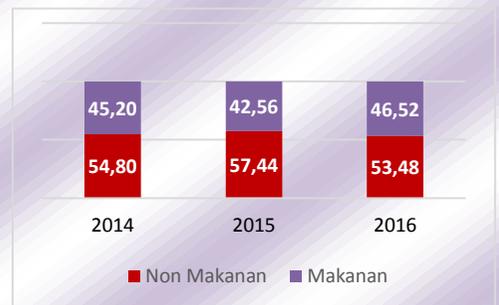
Lebih lanjut dari pola konsumsi masyarakat juga terlihat adanya kecenderungan mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan proporsi pengeluaran non makanan, sedangkan makanan mengalami penurunan. Secara teori, proporsi pengeluaran makanan akan semakin berkurang seiring dengan makin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran non makanan, tentu berimplikasi positif terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan karena terkait erat dengan biaya pendidikan serta kesehatan masyarakat. Meningkatnya proporsi pengeluaran non makanan, diharapkan akan meningkatkan jenjang pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu diakses oleh penduduk.

Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (000 Rp)



Sumber : BPS

Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2016 (%)



Sumber : BPS

Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2016

Konsumsi	2015	2016
Kalori (kkal)	2 091,16	2 157,61
Protein (gram)	62,59	64,55

Sumber : BPS

PENGELUARAN PENDUDUK

Porsi Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Masih Paling Tinggi

Pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga mengambil porsi 30 persen terhadap total pengeluaran masyarakat.

Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau (%)

Komoditi	Rata-rata Pengeluaran Perkapita		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Makanan & minuman jadi	15,88	11,52	15,43
Tembakau & Sirih	5,19	7,74	5,45
Ikan	4,59	6,29	4,77
Padi-padian	4,07	7,26	4,40
Sayur-sayuran	3,49	4,19	3,56
Telur, susu	3,10	3,40	3,13
Daging	2,57	1,55	2,47
Buah-buahan	2,16	1,71	2,11
Bahan Minuman	1,17	2,56	1,31
Minyak& lemak	0,94	1,80	1,03
Bumbu-bumbuan	0,88	1,47	0,94
Konsumsi lainnya	0,79	1,48	0,86
Kacang-kacangan	0,60	0,61	0,60
Umbi-umbian	0,48	0,39	0,47
Total Makanan	45,89	51,96	46,52
Perumahan & fasilitas rumah tangga	30,58	29,53	30,46
Barang & jasa	8,81	6,76	8,60
Pendidikan	3,38	2,49	3,29
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	3,02	3,00	3,01
Barang-barang yang tahan lama	3,07	2,47	3,00
Pajak & asuransi	2,74	1,95	2,66
Kesehatan	1,36	1,28	1,35
Keperluan pesta & upacara	1,16	0,75	1,12
Total Non Makanan	54,11	48,04	53,48
Total Pengeluaran	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka , 2017

Berdasarkan jenis komoditas, makanan dan minuman jadi merupakan jenis yang mengambil porsi terbesar dari kelompok pengeluaran makanan masyarakat. Kemudian disusul oleh komoditas ikan, dikarenakan Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar wilayahnya lautan, maka ikan hampir menjadi komoditas konsumsi utama masyarakat.

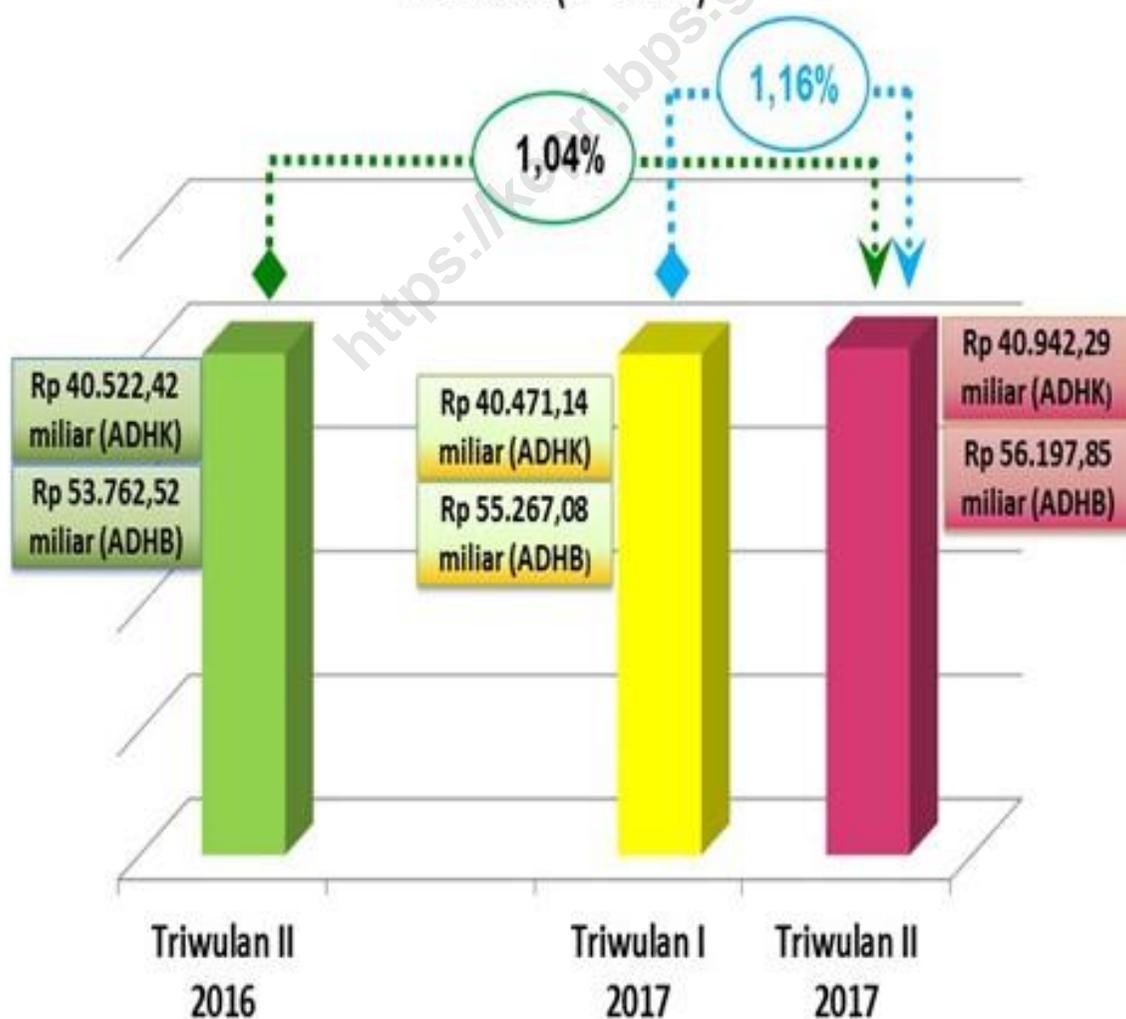
Selain kedua komoditas di atas, tembakau dan sirih serta padi-padian juga mengambil porsi yang cukup lumayan. Hal yang berdampak tidak baik adalah bagi masyarakat yang masih mengkonsumsi rokok sebagai kebutuhan sehari-harinya yang kemudian akan berdampak pada kesehatan dan pengeluaran lanjutan untuk berobat akibat dampak dari penyakit yang ditimbulkan.

Perbedaan tempat tinggal baik di perkotaan maupun di perdesaan berdampak pada pola pengeluaran. Untuk komoditas ikan dan daging, daerah perdesaan untuk porsi ikan lebih tinggi, sedangkan porsi daging sangat rendah. Hal ini dikarenakan harga ikan di perdesaan lebih terjangkau dan banyak masyarakat perdesaan yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sama halnya untuk daerah perkotaan, meskipun perbedaan porsi ikan dan daging tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada pengeluaran non makanan masyarakat, kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan jenis yang mengambil porsi terbesar dari pengeluaran masyarakat; diikuti oleh barang dan jasa; serta pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

BAB 18. PENDAPATAN REGIONAL

Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II-2017 Tumbuh **1,04** Persen (Y-on-Y)



Ekonomi Kepri Semester I tumbuh sebesar 1,52 %

PENDAPATAN REGIONAL

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Masih Mengandalkan Industri Pengolahan

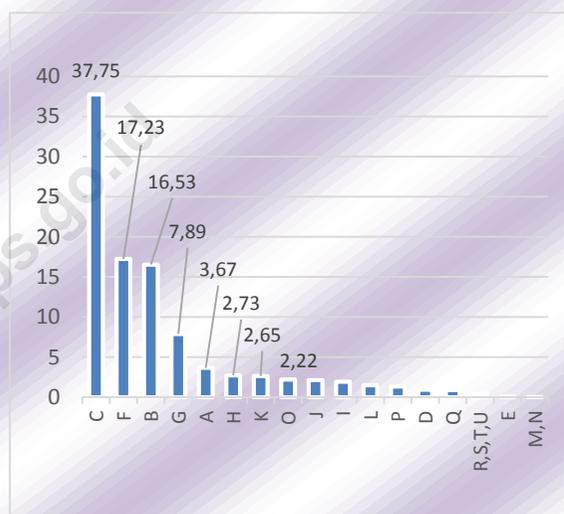
Sektor Industri Pengolahan masih mendominasi struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 37,75 persen.

18

Sebagai cerminan total nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentu memegang peran penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pada tahun 2017, total nilai tambah yang tercipta di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 216,58 triliun rupiah. Angka ini tergolong cukup tinggi untuk ukuran provinsi kecil.

Peranan industri pengolahan yang mencapai 37,75 persen sebagai motor penggerak ekonomi tercermin jelas pada struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat dari sumbangan masing-masing kategori dalam membentuk PDRB. Kategori ini pula yang mewarnai tumbuhnya ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,03 persen pada tahun 2016. Kategori konstruksi merupakan kategori terbesar kedua dengan *share* mencapai 16,53 persen terhadap total PDRB.

Distribusi Persentase PDRB menurut Sektor di Kepulauan Riau, 2016



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

*** Tahukah Anda

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,03 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,01 persen.

Lampiran :

A = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B = Pertambangan dan Penggalian

C = Industri Pengolahan

D = Pengadaan Listrik dan Gas

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F = Konstruksi

G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H = Transportasi dan Pergudangan

I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J = Informasi dan Komunikasi

K = Jasa Keuangan dan Asuransi

L = Real Estate

M,N = Jasa Perusahaan

O = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P = Jasa Pendidikan

Q = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U = Jasa lainnya

18

PENDAPATAN REGIONAL

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tumbuh Melambat

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 1,04 persen pada triwulan II-2017, tumbuh lambat bila dibandingkan dengan triwulan II-2016 yang sebesar 5,17persen.

Perkembangan PDRB Kepri, 2014-2016

Uraian	2014	2015*	2016**
Dengan Migas			
PDRB ADHK (2010=100) (milyar Rp)	146 325	155 113	162 922
PDRB ADHB (Miliar Rp)	180 880	199 539	216 580
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,60	6,01	5,03

Keterangan : *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp56,20 triliun dan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) mencapai Rp40,94 triliun.

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2017 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,04 persen, melambat dibanding pertumbuhan triwulan II-2016 (*y-on-y*) yang tumbuh hingga 5,17 persen. Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan II-2017 dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 20,26 persen; diikuti oleh Pengadaan Air sebesar 12,00 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 11,17 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau triwulan II-2017 secara *year on year*, Transportasi dan Pergudangan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 0,55 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,54 persen; serta Informasi dan Komunikasi 0,16 persen.

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2017 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) tumbuh sebesar 1,16 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Tiga kategori yang memberikan andil pertumbuhan terbesar antara lain: kategori Pertambangan dan Pengalihan 0,51 persen; kategori Industri Pengolahan 0,45 persen; serta kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,38 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pada triwulan ini terutama disebabkan oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mempunyai andil terhadap pertumbuhan sebesar 2,06 persen dan Konsumsi Rumah Tangga yang mempunyai andil terhadap pertumbuhan sebesar 1,17 persen.

Pertumbuhan PDRB Kepri Triwulanan, 2013-2017
y on y (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

BAB 19. PERBANDINGAN REGIONAL

Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatera, Triwulan II 2017



PERBANDINGAN REGIONAL

Kinerja Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Sepanjang 2017 Belum Memuaskan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan II-2017 terendah se-Sumatera.

19

Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru, maka tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki angka IPM tertinggi se-Sumatera, yaitu 73,75 dan di atas angka IPM nasional. Hanya ada tiga provinsi yang angka IPM nya di atas angka nasional, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat. Provinsi Lampung memiliki angka IPM terendah se-Sumatera, yaitu 66,95.

Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi pada tahun 2016, yaitu Provinsi Riau, yaitu 70,97 di atas AHH Nasional. Sementara itu, AHH terendah adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu 68,33. Harapan Usia Sekolah (EYS) tertinggi adalah Provinsi Aceh, yaitu 13,89, sedangkan EYS terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung, yaitu 11,71. MYS (Rata-rata Lama Sekolah) tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau 9,67, sedangkan terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung, yaitu 7,62.

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi se-Sumatera triwulan II-2017 tahun dasar 2010 adalah sebesar 4,09 persen, belum cukup menggembirakan karena masih di bawah angka nasional yang sebesar 5,01 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pertumbuhan tertinggi se-Sumatera, yaitu sebesar 5,36 persen. Ada tujuh provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan nasional, yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau yang terendah se-Sumatera, yaitu sebesar 1,04 persen.

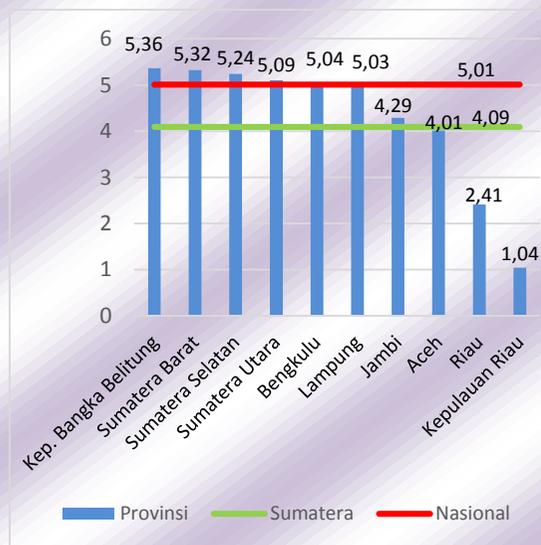
Dari kedua indikator tersebut terlihat bahwa kinerja perekonomian wilayah ini belum cukup membanggakan. Masih diperlukan kerja keras pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dan pelayanan baik di bidang pendidikan maupun kesehatan masyarakat di Kepulauan Riau.

Perbandingan IPM, Angka Harapan Hidup, Harapan Usia Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera Tahun 2016 (Metode Baru)

Provinsi	IPM	AHH (Tahun)	EYS (Tahun)	MYS (Tahun)
Aceh	70,00	69,51	13,89	8,86
Sumut	70,00	68,33	13,00	9,12
Sumbar	70,73	68,73	13,79	8,59
Riau	71,20	70,97	12,86	8,59
Jambi	69,62	70,71	12,72	8,07
Sumsel	68,24	69,16	12,23	7,83
Bengkulu	69,33	68,56	13,38	8,37
Lampung	67,65	69,94	12,35	7,63
Babel	69,55	69,92	11,71	7,62
Kepri	73,99	69,45	12,66	9,67
Indonesia	70,18	70,90	12,72	7,95

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se- Sumatera Tahun Dasar 2010, Triwulan II-2017 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

PERBANDINGAN REGIONAL

Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Terkecil Kedua se-Sumatera

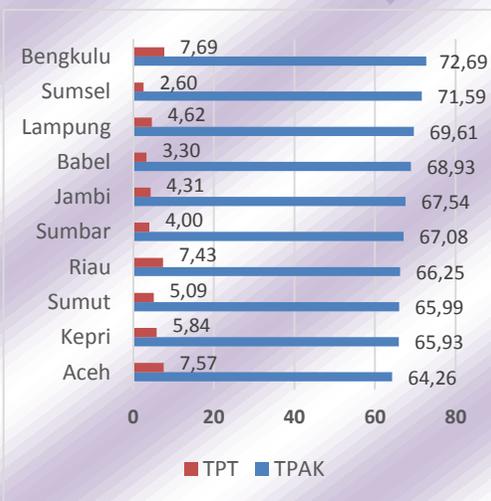
Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Sumatera, 2014-2016 (%)

Uraian	2014	2015	2016
Aceh	16,98	17,11	16,43
Sumut	9,85	10,79	10,27
Sumbar	7,41	6,71	7,14
Riau	7,99	8,82	7,67
Kep. Riau	6,40	5,78	5,84
Jambi	8,39	9,12	8,37
Sumsel	13,62	13,77	13,39
Kep. Babel	4,97	4,83	5,04
Bengkulu	17,09	17,16	17,03
Lampung	14,21	13,53	13,86
Indonesia	11,22	11,13	10,70

Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi se-Sumatera dan Indonesia, 2016 (%)



Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Perkembangan penduduk miskin pada tahun 2016 di Sumatera hanya enam provinsi saja yang mengalami penurunan seiring dengan penurunan penduduk miskin secara nasional. Pada tahun 2016, empat provinsi di Sumatera mempunyai tingkat kemiskinan di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,70 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 17,03 persen, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional.

Provinsi Bengkulu, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung masih memiliki persentase penduduk miskin di atas angka nasional, sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dengan persentase masing-masing sebesar 5,04 persen dan 5,84 persen.

Secara nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,34 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,61 persen. Ada enam provinsi yang TPAK nya di atas angka nasional, sedangkan empat provinsi lagi TPAK-nya masih di bawah nasional.

TPT provinsi di Sumatera dapat dikategorikan cukup baik yang diindikasikan dengan adanya enam dari sepuluh provinsi yang mempunyai TPT di bawah TPT Nasional. Di antara enam provinsi tersebut, yang memiliki TPT terendah di Sumatera pada tahun 2016 ialah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, enam provinsi yang memiliki TPT di atas Nasional sekaligus TPT tertinggi ialah Provinsi Bengkulu sebesar 7,69 persen, Aceh sebesar 7,57 persen, Riau sebesar 7,43 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 5,84 persen. Capaian TPT Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 5,84 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,20 persen.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29100
Telp. (0771) 4500150, Fax. (0771) 4500151
<http://kepri.bps.go.id> e-mail: bps2100@bps.go.id

ISSN : 2442-6296



9 772442 629002